

LAPORAN PENELITIAN

SINERGI KANTOR PERTANAHAN DENGAN KELOMPOK TANI
DALAM MEMBERDAYAKAN PETANI
(Studi Di Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah)



Peneliti:
Aristiono Nugroho
Tullus Subroto
Haryo Budhiawan

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

YOGYAKARTA – 2013 LEMBAR PENGESAHAN

PENELITIAN DENGAN JUDUL

SINERGI KANTOR PERTANAHAN DENGAN KELOMPOK TANI
DALAM MEMBERDAYAKAN PETANI
(Studi Di Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah)

Peneliti:

Aristiono Nugroho

Tullus Subroto

Haryo Budhiawan

Laporan penelitian ini telah diseminarkan di hadapan Tim Evaluasi Penelitian
pada tanggal di Yogyakarta

Telah Diperiksa oleh:
Pembimbing

Disetujui oleh:
Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian
Pada Masyarakat

Dr. Ir. Rochmat Martanto, M.Si.
NIP.

I.G. Nyoman Guntur, A.Ptnh., M.Si.
NIP. 19621231 198603 1 062

K A T A P E N G A N T A R

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatNya laporan ini dapat diselesaikan. Juga terimakasih kepada para penulis yang karyanya menjadi referensi dalam penelitian ini. Tak lupa penyusun/peneliti menyampaikan ucapan yang sama (“terimakasih”) kepada semua pihak yang telah berbaik hati membantu proses pengumpulan data, seperti:

1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora,
2. Kepala Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat,
3. Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah,
4. Sekretaris Desa Mojorembun Kecamatan Kradenan,
5. Kepala Desa Sendangharjo Kecamatan Blora,
6. Kepala Dukuh Pilangrejo Desa Sendangharjo,
7. Sekretaris Panitia Desa untuk pelaksanaan SMS di Desa Sendangharjo,
8. Ketua Kelompok Tani “Sidorahayu” Desa Sendangharjo, dan
9. Anggota Kelompok Tani “Sidorahayu” Desa Sendangharjo.

Atas bantuan berbagai pihak, penelitian ini berhasil mengetahui bahwa Sinergi Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dengan kelompok tani dalam memberdayakan petani, nampak dalam pelaksanaan kegiatan SMS di Desa Sendangharjo Kecamatan Blora Kabupaten Blora. Kegiatan ini terselenggara atas peran yang dijalankan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dan kelompok tani yang ada di Desa Sendangharjo. Namun demikian tidak dapat dikesampingkan adanya peran pendukung yang dijalankan oleh pihak-pihak lain yang terkait, seperti Pemerintah Desa Sendangharjo, Panitia Desa Untuk Pelaksanaan SMS di Desa Sendangharjo, Pemerintah Kabupaten Blora, dan petani Desa Sendangharjo. Pada awalnya pihak-pihak ini memiliki makna tertentu atas terjadinya sinergi tersebut, tetapi seiring dengan berlangsungnya interaksi para pihak, maka pihak-pihak ini melakukan penyempurnaan terhadap makna sinergi tersebut.

Yogyakarta, 2013
Penyusun

A B S T R A K

Kabupaten Blora memiliki beberapa kelompok tani yang diorganisir oleh petani di tingkat desa. Kelompok tani dari beberapa desa selanjutnya mengorganisir diri dalam Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) di tingkat kecamatan. Organisasi petani ini berupaya memperjuangkan kepentingan mendasar petani, terutama dalam mendukung kegiatan pertanian para anggotanya, dan berinteraksi dengan institusi yang berkehendak membantu atau memberdayakan petani. Hal ini menimbulkan pertanyaan utama, yaitu: “Bagaimana sinergi Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dengan kelompok tani dalam memberdayakan petani?”

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka dilakukan penelitian dengan menggunakan Metode Kualitatif Rasionalistik, yang secara teknis mencakup hal-hal, sebagai berikut: (1) subyek dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dan staf, kepala desa dan perangkat desa, serta ketua dan anggota kelompok tani di Kabupaten Blora; (2) informan penelitian adalah sebagian dari subyek penelitian yang dapat dan berkesempatan memberi informasi tentang sinergi kantor pertanahan dengan kelompok tani dalam memberdayakan petani; (3) secara keseluruhan ada 11 (sebelas) orang informan dalam penelitian ini; (4) data primer dalam penelitian berupa data kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dengan berpedoman secara *non rigid* (tidak kaku) pada *interview guide*; (5) data sekunder berupa data yang diperoleh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dan Kantor Desa Sendangharjo, yang dapat mengantarkan pada pemahaman tentang kondisi wilayah dalam kaitannya dengan sinergi kantor pertanahan dengan kelompok tani dalam memberdayakan petani; (6) Metode Kualitatif Rasionalistik yang diterapkan pada penelitian ini juga dilengkapi teknik analisis data, yang dilakukan secara Kualitatif.

Akhirnya penelitian ini berhasil mengetahui, bahwa: Sinergi Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dengan kelompok tani dalam memberdayakan petani, nampak dalam pelaksanaan kegiatan SMS di Desa Sendangharjo Kecamatan Blora Kabupaten Blora. Kegiatan ini terselenggara atas peran yang dijalankan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dan kelompok tani yang ada di Desa Sendangharjo. Namun demikian tidak dapat dikesampingkan adanya peran pendukung yang dijalankan oleh pihak-pihak lain yang terkait, seperti Pemerintah Desa Sendangharjo, Panitia Desa Untuk Pelaksanaan SMS di Desa Sendangharjo, Pemerintah Kabupaten Blora, dan petani Desa Sendangharjo. Pada awalnya pihak-pihak ini memiliki makna tertentu atas terjadinya sinergi tersebut, tetapi seiring dengan berlangsungnya interaksi para pihak, maka pihak-pihak ini melakukan penyempurnaan terhadap makna sinergi tersebut.

D A F T A R I S I

	Halaman
Lembar Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Abstrak	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	4
C. Tinjauan Pustaka	4
D. Metode Penelitian	8
BAB II : SEKILAS KABUPATEN BLORA DAN DESA SENDANGHARJO	12
A. Sekilas Kabupaten Blora	12
B. Sekilas Desa Sendangharjo	16
BAB III : MAKNA SINERGI BAGI PARA PIHAK	19
A. Para Pihak Yang Bersinergi	19
B. Memaknai Sinergi	25
BAB IV : INTERAKSI DALAM SINERGI	32
A. Interaksi Para Pihak	32
B. Penyempurnaan Makna Sinergi	52
BAB V : PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Rekomendasi	60
Daftar Pustaka	61

B A B I P E N D A H U L U A N

A. LATAR BELAKANG

Wilayah Kabupaten Blora terdiri atas dataran rendah dan perbukitan dengan ketinggian 25 – 500 meter dpl. Bagian utara merupakan kawasan perbukitan, sebagai bagian dari rangkaian [Pegunungan Kapur Utara](#). Sementara itu bagian selatan juga berupa perbukitan kapur yang merupakan bagian dari [Pegunungan Kendeng](#), yang membentang dari timur Semarang hingga [Lamongan](#) (Jawa Timur). Ibukota Kabupaten Blora sendiri terletak di cekungan Pegunungan Kapur Utara. Uniknya, hampir separuh atau 48,41 % wilayah Kabupaten Blora merupakan kawasan [hutan](#), terutama di bagian utara, timur, dan selatan.

Dataran rendah terdapat di bagian tengah Kabupaten Blora, yang umumnya berupa areal [persawahan](#). Ironisnya, sebagian besar wilayah Kabupaten Blora merupakan daerah krisis [air](#) (baik untuk air minum maupun untuk irigasi) pada musim kemarau, terutama di daerah pegunungan kapur. Dengan demikian air merupakan masalah yang menjadi perhatian serius. Ketersediaan air relatif bervariasi menurut ruang dan waktu, sedangkan kebutuhan air terus meningkat mengikuti jumlah penduduk.

Salah satu tindakan untuk mengatasi masalah air di tanah kering adalah menyimpan air di musim hujan, untuk dimanfaatkan pada musim kemarau dengan melakukan pengelolaan air (manajemen air). Oleh karena itu, pada daerah yang mempunyai curah hujan sedang seperti di Kabupaten Blora ini, maka tindakan pengelolaan air layak mendapatkan prioritas. Hal ini perlu dilakukan untuk mengatasi

krisis air, yang sangat terasa pada musim kemarau dengan adanya sejumlah sungai yang mengering (lihat Suprpto, 2006).

Dalam hal pertanian, tanaman pangan merupakan tanaman utama yang di usahakan di Kabupaten Blora, terutama dalam mencukupi kebutuhan pangan sehari – hari petani. Selain itu, usaha pemeliharaan ternak, seperti: sapi, kambing, dan domba, merupakan usaha pokok disamping usaha pertanian pangan, namun dalam pengusahaannya masih belum intensif.

Tujuan utama usaha ternak adalah untuk menambah pendapatan serta memanfaatkan kotorannya untuk pupuk. Dalam usaha tani di tanah kering, biasanya petani masih melakukan secara individu dan belum berkelompok. Kelompok tani sebagai organisasi tempat berkumpulnya petani kurang berjalan sebagaimana mestinya, selain itu dalam berkelompok petani lebih banyak bersifat sosial. Padahal dalam implementasinya konsep pemberdayaan petani menggunakan kelompok, dan kelembagaan kelompok yang mengarah pada profit, dan bukan hanya administrasi dan sosial (lihat Kartasasmita, 1996).

Secara sendiri-sendiri tidak mudah bagi petani untuk mengembangkan kehidupan ekonominya. Keterbatasan pengetahuan, kelangkaan sumberdaya dan sempitnya peluang, seringkali membelenggu mereka. Kerjasama, dan saling membantu, memberi peluang bagi petani untuk memeperkuat posisinya, meningkatkan kepercayaan diri, dan kepercayaan orang lain. Saling menolong dan bekerjasama memperkuat dan memperluas kesempatan untuk mencapai kemajuan.

Petani perlu berkelompok atau membentuk kelompok tani, agar berpeluang: **Pertama**, memperoleh persahabatan dan kerjasama dengan petani lainnya. **Kedua**,

mewujudkan semangat saling membantu. **Ketiga**, melatih diri berpikir bersama dan bermusyawarah. **Keempat**, mengembangkan sikap dan motivasi untuk maju. **Kelima**, belajar memimpin dan bertanggung-jawab. **Keenam**, belajar memutuskan tujuan dan rencana kegiatan. **Ketujuh**, mengembangkan sikap dan kebiasaan menabung. **Kedelapan**, mengembangkan usaha produktif. **Kesembilan**, memperoleh pelayanan pinjaman untuk modal usaha. **Kesepuluh**, memperoleh pelayanan yang baik dari pihak lain, misalnya bank. **Kesebelas**, memperoleh bimbingan dan pembinaan dari pihak yang menaruh perhatian pada pemberdayaan petani (lihat BP DAS Jeneberang Walane, 2008).

Sebagaimana wilayah lainnya, Kabupaten Blora memiliki beberapa kelompok tani yang diorganisir oleh petani di tingkat desa. Kelompok tani dari beberapa desa selanjutnya mengorganisir diri dalam Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) di tingkat kecamatan. Organisasi petani ini berupaya memperjuangkan kepentingan mendasar petani, terutama dalam mendukung kegiatan pertanian para anggotanya, dan berinteraksi dengan institusi yang berkehendak membantu atau memberdayakan petani. Dalam konteks pertanian dan berdasarkan kegiatan kelompok tani, maka terbuka peluang sinergi antara kelompok tani dengan kantor pertanian. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian dengan judul, “Sinergi Kantor Pertanian Dengan Kelompok Tani Dalam Memberdayakan Petani (Studi Di Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah).” Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian, “Bagaimana sinergi Kantor Pertanian Kabupaten Blora dengan kelompok tani dalam memberdayakan petani?”

B. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan, “Untuk mengetahui sinergi Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dengan kelompok tani dalam memberdayakan petani,” sedangkan manfaat dari penelitian ini, antara lain: **Pertama**, bagi BPN-RI, yaitu: (a) sebagai sumber informasi tentang sinergi Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dengan kelompok tani dalam memberdayakan petani, dan (b) sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat; **Kedua**, bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), manfaat yang dapat diperoleh antara lain berupa *reservoir* intelektual di bidang sosiologi pertanahan, dan sekaligus *trigger* (pemicu) pengembangannya di STPN, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.

C. TINJAUAN PUSTAKA

K.J. Veeger (1990) menyatakan, bahwa masyarakat terdiri dari individu-individu yang masing-masing berpikir sendiri, berkemauan sendiri, berperasaan sendiri, berbadan sendiri, dan beralamat sendiri. Untuk lebih mengetahui konsepsi individu pada masyarakat perlu kiranya diperhatikan pendapat John Dewey (1859-1952), yang mengungkapkan filsafat instrumentalisme. Filsafat ini menolak pemisahan antara teori (hasil pengamatan terhadap praktek) dengan praktek. Filsafat ini juga menolak anggapan adanya *value free science* (ilmu atau sains bebas nilai). Penolakan ini didasari pada kekhawatiran, bahwa sains semacam ini akan melucuti pengetahuan manusia dari ciri kemanusiaannya yaitu nilai-nilai kemanusiaan, meskipun diketahui bahwa *value free science* sendiri menolak anggapan bahwa pikiran manusia merupakan cerminan dari luar.

Menurut K.J. Veeger, manusia tidak secara pasif menerima saja pengetahuannya dari luar, tetapi secara aktif dan dinamis membentuk sendiri pengetahuan (pemikiran) dan perilakunya. Lingkungan hidup dan situasinya tidak mendeterminir (membatasi) dia, tetapi merupakan kondisi yang menjadi dasar bagi penentuan sikapnya. Dalam tataran teori tindakan diketahui, bahwa pemikiran John Dewey yang menggaris bawahi kesatuan antara berpikir dengan bertindak, telah mempengaruhi George Herbert Mead (1863-1931), sehingga dapat “melihat” bahwa pikiran (*mind*) dan kedirian (*self*) merupakan dasar dari perilaku manusia, khususnya ketika berinteraksi dengan orang lain.

David Jary dan Julia Jary menjelaskan bahwa Mead dipengaruhi oleh John Dewey dan Charles Horton Cooley. Sedangkan K.J. Veeger menyatakan bahwa Mead menaruh perhatian pada upaya manusia mengenakan arti pada dunianya. Sementara itu, Nicholas Abercrombie dan kawan-kawan menyatakan bahwa Mead menaruh perhatian pada kehidupan sosial, yang menurut Mead ditentukan oleh kemampuan manusia membayangkan dirinya pada peran sosial orang lain, dan kemampuan manusia yang bersangkutan berdiskusi secara internal dengan dirinya sendiri. Akhirnya Herbert Blumer (dalam Poloma, 1994:261) berhasil memahami konsepsi yang ada pada pemikiran Mead, dan mengemasnya dalam teori sosiologi yang disebut Teori Interaksionisme Simbolik. Teori ini menyatakan, bahwa: Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka; Makna tersebut berasal dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain; Makna-makna tersebut disempurnakan di saat proses interaksi sosial berlangsung.

Dengan memanfaatkan Teori Interaksionisme Simbolik, sinergi Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dengan kelompok tani dalam memberdayakan petani dapat diamati dalam beberapa segmen, sebagai berikut: **Pertama**, makna sinergi bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dan kelompok tani yang ada di Kabupaten Blora. **Kedua**, proses pembentukan makna sinergi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dan kelompok tani yang ada di Kabupaten Blora. **Ketiga**, interaksi antara Pertanahan Kabupaten Blora dengan kelompok tani yang ada di Kabupaten Blora. **Keempat**, proses penyempurnaan makna sinergi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dan kelompok tani yang ada di Kabupaten Blora.

Ketika saling menyempurnakan makna, maka akan terbuka peluang terjadinya benturan antara hukum negara (berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku) dengan hukum lokal (berdasarkan tradisi, norma, dan ketentuan setempat). Tentang hal ini Julius Sembiring (2012:83) menjelaskan, bahwa ketika hukum negara berbenturan dengan hukum lokal, maka akan terjadi dinamika eksternal hukum. Sementara itu, ketika terjadi benturan antar berbagai aturan sektoral, maka akan terjadi dinamika internal hukum. Dengan demikian sebagai sebuah konsepsi sosial, maka hukum bersifat dinamis, sehingga penyempurnaan makna suatu konsep layak dilakukan secara terus menerus.

Interaksi Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dengan kelompok tani yang ada di Kabupaten Blora, juga dapat didekati dengan mengamati pertemuan keduanya pada simpul agribisnis, meskipun dalam ukuran yang relatif kecil. Konsep agribisnis memanfaatkan teknologi yang bercirikan, mampu: (1) meningkatkan efisiensi dan *cost effectiveness* produksi melalui teknologi inovatif, (2) menekan biaya produksi

dan meningkatkan kualitas produk, (3) menghasilkan produk primer berkualitas tinggi dengan standar harga pasar yang baik, (4) mengurangi kehilangan hasil pada saat pra panen dan pasca panen, (5) mengolah *by-product* menjadi produk bernilai tambah, (6) mempertahankan produktivitas dan kualitas produksi, serta suplai produk ke pasar secara berkesinambungan, dan (7) mampu memperbaiki kualitas kemasan untuk transportasi (lihat Budianto, 2002).

Ketika sinergi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dan kelompok tani yang ada di Kabupaten Blora sedang dilakukan, maka perhatian terutama harus ditujukan pada upaya mensejahterakan petani miskin. Ashley dan Carney (1999) menjelaskan, bahwa petani miskin di pedesaan mempunyai strategi yang berbeda – beda untuk meningkatkan pendapatannya, di mana hal ini tergantung pada keadaan sistim pertanian yang berkembang di wilayahnya. Oleh karena itu, Berdeque dan Escobar (2002) menyatakan, bahwa program yang disusun untuk mengurangi kemiskinan di pedesaan harus didasarkan potensi sumber daya di masing – masing lokasi, dengan melihat hubungan langsung ataupun tidak langsung yang mempengaruhi produktivitas pertanian.

Dengan demikian sinergi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dan kelompok tani yang ada di Kabupaten Blora dapat menjangkau kesejahteraan petani dengan tetap mempertimbangkan ekosistem. Hal ini akan mendukung tercapainya suatu sistem usaha tani produktif yang berkelanjutan, yang bercirikan penggunaan input luar yang rendah. Sistem usaha tani ini juga sejalan dengan konsep diversifikasi horizontal dalam upaya peningkatan pendapatan rumah tangga tani, yaitu mengembangkan komoditas unggulan sebagai *core of business*, serta

mengembangkan usaha tani komoditas lainnya sebagai penyangga. Kesemua ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam, modal, dan tenaga kerja keluarga, serta memperkecil terjadinya resiko kegagalan usaha (lihat Sarjana, 2001). Diversifikasi usaha tani tersebut sebaiknya dilakukan dengan memperhatikan lingkungan sehingga tidak terjadi degradasi tanah (lihat Orgendo, 1998).

Hal ini penting, karena menurut Rusdi (2012:58), bagi seorang petani, tanah merupakan satu-satunya harta yang paling berharga, karena tanah dapat dipergunakan untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Sementara itu, Padmo (2000:20) menyatakan, bahwa sawah bagi seorang petani merupakan sesuatu yang membahagiakan, karena selain dapat memenuhi kebutuhan hidup, juga memberi kesempatan pada pemiliknya untuk terlibat dalam pengambilan keputusan pada kegiatan di desa.

Arifin (2012:208) menambahkan, bahwa wacana pemikiran yang berkembang dalam kehidupan keluarga petani di desa, tercermin dalam dialog sehari-hari mereka, tentang hubungan manusia dengan lingkungan alam sekitarnya. Dalam hidup ini ada keadaan tertentu di mana manusia harus tunduk serta patuh pada lingkungan alam sekitarnya, dan dalam kondisi tertentu harus mampu menyesuaikan dengan kondisi lingkungan alam sekitarnya.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian “Sinergi Kantor Pertanahan Dengan Kelompok Tani Dalam Memberdayakan Petani (Studi Di Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah),” peneliti menggunakan Metode Kualitatif Rasionalistik. Sebagaimana diketahui Metode

Kualitatif lebih menekankan analisisnya, pada proses penyimpulan deduktif (dari umum ke khusus) dan induktif (dari khusus ke umum), dari pengamatan terhadap keunikan fenomena yang ada dengan menggunakan logika ilmiah (lihat Azwar, 1998:5). Metode ini juga dilengkapi dengan Pendekatan Rasionalistik, yang berdasarkan Filsafat Rasional menyatakan, bahwa ilmu berasal dari pemahaman intelektual yang dibangun atas kemampuan berargumen secara logik (lihat Muhajir, 1998: 55).

Dengan demikian dari Metode Kualitatif Rasionalistik ini dapat diperoleh data kualitatif dari para informan (lihat Moleong, 2007:4). Secara teknis Metode Kualitatif Rasionalistik yang digunakan dalam penelitian ini mencakup 5 (lima) hal, sebagai berikut: subyek dan informan penelitian, jumlah informan, teknik menjangkau informan, jenis data yang diperoleh, serta teknik analisis data. Berdasarkan ketetapan itu, subyek dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dan staf, kepala desa dan perangkat desa, serta ketua dan anggota kelompok tani di Kabupaten Blora. Sedangkan informan penelitian adalah sebagian dari subyek penelitian yang dapat dan berkesempatan memberi informasi tentang sinergi kantor pertanahan dengan kelompok tani dalam memberdayakan petani (lihat Moleong, 2007:224).

Informan dalam penelitian adalah: (1) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, (2) Kepala Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat, (3) Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah, (4) Sekretaris Desa Mojorembun Kecamatan Kradenan, (5) Kepala Desa Sendangharjo Kecamatan Blora, (6) Sekretaris Desa Sendangharjo Kecamatan Blora, (7) Kepala Dukuh Pilangrejo Desa Sendangharjo, (8) Sekretaris

Panitia Desa untuk pelaksanaan SMS di Desa Sendangharjo, (9) Ketua Kelompok Tani “Sidorahayu” Desa Sendangharjo, (10) Anggota Kelompok Tani “Sidorahayu” Desa Sendangharjo.

Secara keseluruhan ada 11 (sebelas) orang informan dalam penelitian ini, walaupun secara metodologis (kualitatif) jumlah informan tidaklah ditentukan secara rigid, karena bersifat situasional dan kondisional. Sesungguhnya jumlah informan tidaklah mengikat, sebab jumlah ini ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan informasi yang diperlukan. Jika tidak ada lagi informasi yang diperlukan penggalan informasi dari informan berikutnya dapat dihentikan (lihat Moleong, 2007:224). Informan dipilih dengan teknik menjanging informan yang dalam hal ini dilakukan secara *purposive*, agar dapat diperoleh akumulasi informasi dari orang yang tepat (lihat Moleong, 2007:224). Sementara itu, jenis data yang diperoleh, terdiri dari data primer dan data sekunder.

Data primer, yaitu data kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dengan berpedoman secara *non rigid* (tidak kaku) pada *interview guide*. Sementara itu, data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dan Kantor Desa Sendangharjo, yang dapat mengantarkan pada pemahaman tentang kondisi wilayah dalam kaitannya dengan sinergi kantor pertanahan dengan kelompok tani dalam memberdayakan petani.

Metode Kualitatif Rasionalistik yang diterapkan pada penelitian ini juga dilengkapi teknik analisis data, yang dilakukan secara Kualitatif, dengan tahapan sebagai berikut: **Pertama**, telaah awal seluruh data; **Kedua**, reduksi dan abstraksi data; **Ketiga**, penyusunan abstraksi data dalam satuan-satuan informasi terkecil yang

mengandung makna, dan dapat berdiri sendiri; **Keempat**, pengelompokan satuan-satuan dalam kategori-kategori; **Kelima**, penyusunan pernyataan proposisional secara logik dari masing-masing kategori (lihat Moleong, 2007:248-277).

B A B II SEKILAS KABUPATEN BLORA DAN DESA SENDANGHARJO

A. Sekilas Kabupaten Blora

Kabupaten Blora adalah bagian dari Provinsi Jawa Tengah, yang berada di ujung Timur provinsi ini dengan karakteristik, sebagai berikut: **Pertama**, kabupaten ini berada di antara $111^{\circ} 16'$ sampai dengan $111^{\circ} 38'$ Bujur Timur dan di antara $6^{\circ} 52,8'$ sampai dengan $7^{\circ} 24,8'$ Lintang Selatan. Jarak terjauh dari wilayah Barat hingga ke wilayah Timur mencapai 87 kilometer, dan dari wilayah Utara ke wilayah Selatan mencapai 58 kilometer. Secara administratif wilayah Kabupaten Blora berbatasan: (1) di sebelah Barat dengan Kabupaten Grobogan; (2) di sebelah Selatan dengan Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur; (3) di sebelah Utara dengan Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati; dan (4) di sebelah Timur dengan Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur.

Kedua, luas wilayah Kabupaten Blora sebesar 182.058,80 Ha atau 5,59 % dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Wilayah Kabupaten Blora terdiri dari: (1) sawah, seluas 24,83 % atau 46.059,99 Ha; (2) permukiman, seluas 9,12 % atau 16.917,16 Ha; (3) tegalan, seluas 14,13 % atau 26.214,96 Ha; (4) waduk, seluas 98,63 Ha; (5) hutan, seluas 48,41 % atau 89.785,25 Ha; (6) perkebunan, seluas 4.000,00 Ha; dan (7) penggunaan tanah lainnya, seluas 1,29 % atau 2.390,64 Ha.

Sementara itu, dari sawah yang seluas 46.059,99 Ha tersebut 30,76 % beririgasi, 64,34 % berupa sawah tadah hujan, dan 4,90 % adalah sawah lainnya.

Ketiga, Kabupaten Blora terdiri dari 16 kecamatan, 271 desa, 24 kelurahan, 941 dusun, 1.204 Rukun Warga, dan 5.692 Rukun Tetangga. Sementara itu, dalam memberi pelayanan pada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Blora memiliki pegawai negeri sipil sebanyak 9.974 orang. Jumlah pegawai ini lebih rendah dari jumlah pegawai tahun sebelumnya, karena adanya pegawai negeri sipil yang pensiun, sebanyak 347 orang. Permasalahan yang ada di Kabupaten Blora, yang terkait dengan kepegawaian adalah masalah penempatan pegawai, yang belum memperhatikan prinsip “the right man on the right place” (lihat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2012:12).

Keempat, Pemerintah Kabupaten Blora menjalankan tugas dan fungsinya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dengan memperhatikan berbagai peraturan daerah yang telah berlaku di Kabupaten Blora. Sebagaimana diketahui peraturan daerah diusulkan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah, yang kemudian dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora. Jumlah peraturan daerah yang berhasil disahkan pada setiap tahunnya tidaklah sama, karena tergantung pada situasi politik yang terkait dengan isi peraturan daerah yang sedang dibahas. Sebagai contoh, pada tahun 2011 berhasil disahkan 20 buah peraturan daerah, yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Blora dan masyarakat Kabupaten Blora.

Kelima, penduduk Kabupaten Blora berjumlah 839.384 orang, yang terdiri dari 415.989 laki-laki dan 423.395 perempuan. Penduduk yang berada pada usia

produktif atau antara usia 15 – 64 tahun berjumlah 570.584 orang, di mana hal ini pada akhirnya mempengaruhi kondisi tenaga kerja di kabupaten ini. Pertanian, kehutanan, perkebunan, dan perikanan merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Kabupaten Blora, yaitu sebanyak 314.016 orang. Sektor berikutnya yang juga banyak menyerap tenaga kerja adalah perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel, yaitu sebanyak 60.914 orang.

Keenam, relevan dengan upaya menciptakan tenaga kerja (sumberdaya manusia) yang berkualitas, maka di Kabupaten Blora terdapat 55 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yang berstatus negeri, dan 29 sekolah yang berstatus swasta. Sementara itu jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas yang berstatus negeri sebanyak 8 sekolah, dan yang berstatus swasta sebanyak 15 sekolah. Selain itu, Kabupaten Blora juga memiliki 3 Sekolah Menengah Kejuruan yang berstatus negeri, dan 43 sekolah yang berstatus swasta. Sebagai pendukung utama keberhasilan pendidikan di sekolah, Kabupaten Blora memiliki 1.879 guru Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, 579 guru Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, dan 1.230 guru Sekolah Menengah Kejuruan. Keberadaan Sekolah Menengah Kejuruan ternyata berhasil menarik minat para pelajar di Kabupaten Blora, di mana jumlah pelajar Sekolah Menengah Kejuruan sebanyak 15.970 orang, sedangkan jumlah pelajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sebanyak 8.015 orang.

Ketujuh, Kabupaten Blora juga memiliki penyandang masalah sosial, yang membutuhkan perhatian Pemerintah Kabupaten Blora. Sebagaimana diketahui di kabupaten ini terdapat 102.459 orang fakir miskin, 3.103 orang balita (anak di bawah usia lima tahun) terlantar, 3.938 anak terlantar, 317 usia lanjut terlantar, dan 20 orang

gelandangan dan pengemis, dan 3 orang penderita ketergantungan narkoba. Untuk mengatasi masalah sosial tersebut, salah satu solusinya adalah penyediaan panti, seperti: (1) panti asuhan yang jumlahnya mencapai 22 buah, (2) panti sosial paska sakit kronis yang jumlahnya hanya 1 buah, dan (3) panti sosial bina karya yang jumlahnya hanya 1 buah.

Kedelapan, tanah pertanian di Kabupaten Blora pada umumnya ditanami empat komoditas pertanian utama, yaitu: (1) padi yang luasnya mencapai 75.530 Ha dengan produksi mencapai 396.533 ton; (2) jagung yang luasnya mencapai 56.472 Ha dengan produksi mencapai 268.242 ton; (3) kedelai yang luasnya mencapai 4.288 Ha dengan produksi mencapai 4.717 ton; dan (4) ketela atau singkong yang luasnya mencapai 1.808 Ha dengan produksi mencapai 23.233 ton.

Kesembilan, tidak kalah dengan pertanian, sektor perkebunan di Kabupaten Blora juga mampu berkontribusi dalam memanfaatkan tanah yang tersedia. Perkebunan di wilayah ini pada umumnya ditanami tiga komoditas perkebunan utama, yaitu: (1) tembakau yang luasnya mencapai 1.143,50 Ha dengan produksi mencapai 1.291 ton; (2) tebu yang luasnya mencapai 2.555,10 Ha dengan produksi mencapai 8.905,88 ton; (3) kelapa yang luasnya mencapai 2.686,26 Ha dengan produksi mencapai 123,43 ton;

Kesepuluh, pada tahun 2012 Kabupaten Blora memiliki tanah kritis yang luasnya mencapai 9.043,08 Ha. Untuk mengatasi hal tersebut, dan hal yang sama pada tahun-tahun sebelumnya, maka dilakukan dua kegiatan pada tahun 2012 yang berupa reboisasi (penghijauan di kawasan hutan) dengan luas 3.290,00 Ha, dan penghijauan seluas 17.465,28 Ha. Sejak dahulu hutan di wilayah ini telah dikenal

sebagai penghasil kayu jati dengan kualitas terbaik. Sebagai contoh, pada tahun 2012 hasil hutan non HPH di wilayah ini mencapai 77.949,90 meter kubik kayu bulat.

Kesebelas, di wilayah Kabupaten Blora juga terdapat 17,7 Ha kolam ikan, yang mampu menghasilkan 290 ton ikan. Sektor perikanan juga memanfaatkan perairan umum, yang berupa rawa dan sungai, yang luasnya mencapai 243 Ha, dengan produksi sebanyak 138,05 ton. Produksi ikan yang relatif besar di wilayah Kabupaten Blora ini kemudian menumbuhkan home industry pengasapan ikan yang jumlahnya mencapai 25 kepala keluarga.

Kedua-belas, hal penting di bidang pertanahan adalah adanya sertipikat hak atas tanah, yang untuk Kabupaten Blora komposisinya adalah sebagai berikut: (1) tanah bersertipikat hak milik sebanyak 264.726 bidang; (2) tanah bersertipikat hak guna bangunan sebanyak 4.235 bidang; (3) tanah bersertipikat hak pakai sebanyak 2.252 bidang; (4) tanah bersertipikat hak pengelolaan sebanyak 9 bidang; dan (5) tanah bersertipikat wakaf sebanyak 632 bidang.

B. Sekilas Desa Sendangharjo

Desa Sendangharjo adalah salah satu desa di Kecamatan Blora Kabupaten Blora yang memiliki karakteristik, sebagai berikut: **Pertama**, desa ini berbatasan dengan wilayah, sebagai berikut: (1) di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ngampel, (2) di sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ngadipurwo dan Desa Tempuran, (3) di sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Keser dan Desa Purwosari, dan (4) di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sitirejo dan Desa Tunjungan.

Kedua, Desa Sendangharjo memiliki luas 746,66 Ha, yang terdiri dari: (1) tanah sawah, seluas 217,00 Ha; (2) tanah tegalan, seluas 180,00 Ha; (3) tanah pekarangan, seluas 43,00 Ha; (4) tanah hutan rakyat, seluas 35 Ha; dan (5) tanah lainnya, seluas 171,66 Ha. Dengan kondisi penggunaan tanah seperti ini, maka diketahui bahwa penggunaan tanah di desa ini didominasi oleh penggunaan tanah pertanian. Selain itu, dengan adanya tanah hutan rakyat seluas 35 Ha, maka dapatlah dikatakan bahwa masyarakat Desa Sendangharjo memiliki kesadaran yang baik dalam hal konservasi tanah.

Ketiga, Desa Sendangharjo berpenduduk 3.490 orang, yang terdiri dari 1.733 orang laki-laki dan 1.767 orang perempuan. Berdasarkan profesinya, di desa ini terdapat: (1) petani dan buruh tani, sebanyak 269 orang; (2) pedagang, sebanyak 215 orang; (3) pegawai negeri sipil, sebanyak 118 orang; (4) karyawan swasta, sebanyak 451 orang; (5) buruh pabrik dan bangunan, sebanyak 119 orang; dan (6) profesi lainnya, sebanyak 278 orang. Dengan kondisi penduduk seperti ini diketahui, bahwa profesi yang paling banyak digeluti oleh masyarakat Desa Sendangharjo adalah profesi sebagai karyawan swasta. Hal ini sekaligus menunjukkan, bahwa profesi sebagai petani tidak lagi menarik minat masyarakat.

Keempat, berdasarkan tingkat pendidikannya, diketahui bahwa di desa ini terdapat: (1) tamatan Sekolah Dasar, sebanyak 264 orang; (2) tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, sebanyak 572 orang; (3) tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, sebanyak 635 orang; dan (4) tamatan Perguruan Tinggi, sebanyak 126 orang. Dengan kondisi penduduk seperti ini diketahui, bahwa masyarakat Desa

Sendangharjo dapatlah digolongkan sebagai masyarakat dengan tingkat pendidikan yang baik, karena di desa ada 126 orang tamatan Perguruan Tinggi.

Kelima, berdasarkan Peraturan Desa Sendangharjo Nomor 01 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012 diketahui, bahwa Desa Sendangharjo pada tahun 2012 memiliki anggaran belanja sebesar Rp. 607.071.000,- yang terdiri dari belanja rutin sebesar Rp. 307.965.000,- dan belanja pembangunan sebesar Rp. 299.106.000,-. Anggaran tersebut diperoleh dari: (1) pendapatan asli desa, sebesar Rp. 214.226.000,-; (2) bantuan Pemerintah Kabupaten Blora, sebesar Rp. 283.283.000,-; (3) bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sebesar Rp. 100.000.000,-; dan (4) swadaya masyarakat, sebesar Rp. 9.562.000,-.

B A B III MAKNA SINERGI BAGI PARA PIHAK

C. Para Pihak Yang Bersinergi

Sinergi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dengan kelompok tani dalam memberdayakan petani di Kecamatan Blora, tidaklah hanya melibatkan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dan kelompok tani, melainkan juga melibatkan pihak-pihak lain yang mendukung dan terkait dengan sinergi tersebut. Wujud sinergi ini terlihat dalam pelaksanaan SMS (Sertifikasi Massal Swadaya) di Desa Sendangharjo Kecamatan Blora, yang melibatkan pihak-pihak, sebagai berikut: **Pertama**, Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, yang merupakan pelaksana SMS di Desa Sendangharjo. Pihak ini paling bertanggung-jawab, atas keabsahan yuridis alas hak yang diajukan oleh petani (masyarakat), akurasi teknis yang berkaitan pengukuran dan pemetaan bidang tanah, serta kebenaran formal atau pemenuhan persyaratan administratif yang diserahkan oleh petani sebagai peserta SMS.

Pada pelaksanaan kegiatan SMS di Desa Sendangharjo, pengurus kelompok tani terlibat dalam kepanitian desa yang mendampingi pelaksanaan SMS, sedangkan peserta SMS adalah anggota kelompok tani. Alasan yang dikemukakan oleh peserta SMS, ketika mereka mengajukan SMS adalah agar dapat memperoleh tambahan modal dari bank untuk usaha taninya. Hal inilah yang direspon oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, yang telah menerbitkan 1.463 Sertipikat Hak Milik di Desa Sendangharjo, Kecamatan Blora. Sementara itu, untuk Kecamatan Blora telah diterbitkan 35.654 Sertipikat Hak Milik, sedangkan untuk seluruh Kabupaten Blora telah diterbitkan 277.238 Sertipikat Hak Milik.

Wilayah Kabupaten Blora yang 48 % adalah kawasan hutan, tidaklah menggentarkan dan tidaklah mematahkan semangat Kantor Pertanahan Kabupaten Blora untuk berikhtiar memberi jaminan kepastian hukum, yang biasa dikenal dengan istilah penguatan asset, sertipikasi hak atas tanah, atau pendaftaran tanah. Luasnya kawasan hutan memberi kesempatan wilayah ini sebagai penghasil kayu jati, walaupun diketahui bahwa potensi hutan ini belum memberi kontribusi yang cukup bagi kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan. Hal inilah yang menyemangati Kantor Pertanahan Kabupaten Blora untuk melakukan penguatan asset pada 16 kecamatan, 271 desa dan 24 kelurahan di kabupaten ini.

Kedua, Pemerintah Desa Sendangharjo, yang merupakan pengusul dan pendukung pelaksanaan SMS. Pihak inilah yang mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, agar SMS dilaksanakan di Desa Sendangharjo. Usulan ini disampaikan, setelah Kepala Desa Sendangharjo mendapat masukan dari sebagian masyarakat (petani) di desanya, yang mengharapkan agar tanah mereka disertipikatkan secara massal. Berdasarkan masukan tersebut, dan konsekuensi atas usulannya, maka Pemerintah Desa Sendangharjo mendukung pelaksanaan SMS.

Kegiatan SMS di Desa Sendangharjo dilaksanakan antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, sedangkan penyerahan sertipikatnya pada tanggal 14 Mei 2013. Awalnya Kepala Desa Sendangharjo mengajukan permohonan untuk 148 bidang, walaupun kemudian dalam realisasinya ternyata hanya dapat dilakukan terhadap 146 bidang. Namun dalam pelaksanaannya 15 bidang belum selesai sampai dengan tanggal 14 Mei 2013, karena persyaratan administrasinya ada yang belum dipenuhi,

sedangkan 131 bidang sudah diproses serta sudah terbit sertipikat hak atas tanahnya, untuk kemudian diserahkan pada tanggal 14 Mei 2013.

Ketiga, Panitia Desa untuk pelaksanaan SMS di Desa Sendangharjo, yang merupakan kepanitiaan yang dibentuk oleh Pemerintah Desa Sendangharjo, sebagai unsur yang membantu pelaksanaan SMS. Tepatnya, kepanitiaan ini dibentuk oleh Kepala Desa Sendangharjo sebagai bukti nyata dukungan Pemerintah Desa atas pelaksanaan SMS. Panitia Desa merupakan unsur utama yang akan membantu pelaksanaan SMS di Desa Sendangharjo. Bantuan yang diberikan berupa dukungan atas keabsahan yuridis alas hak yang diajukan oleh petani, akurasi teknis yang berkaitan pengukuran dan pemetaan bidang tanah, serta kebenaran formal atau pemenuhan persyaratan administratif yang diserahkan oleh petani sebagai peserta SMS.

Panitia desa dalam pelaksanaan SMS di Desa Sendangharjo terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota. Bertindak sebagai ketua, adalah Kepala Desa Sendangharjo, yaitu Sri Suharyanto. Sementara itu, yang diberi amanat oleh Kepala Desa Sendangharjo sebagai sekretaris panitia desa, adalah Wiwik Suhendro yang juga menjabat Ketua Kelompok Tani “Sidorahayu”, dan sekaligus Kepala Dukuh Pilangrejo. Selain itu, panitia desa juga memiliki bendahara yang dijabat oleh Samsuri, yang merupakan anggota Kelompok Tani “Sidorahayu”. Panitia desa juga memiliki anggota yang terdiri dari para kepala dukuh, yaitu Kepala Dukuh Medang, Kepala Dukuh Sendang, Kepala Dukuh Pilangrejo, dan Kepala Dukuh Kedawung.

Keempat, Kelompok Tani, yang merupakan partisipator pelaksanaan SMS yang diperuntukkan bagi para anggotanya. Pihak ini paling berkepentingan atas

pelaksanaan SMS di Desa Sendangharjo, karena anggota Kelompok Tani-lah yang memberi masukan kepada Kepala Desa Sendangharjo, agar segera mengusulkan sertipikasi massal atas tanah para petani kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora. Oleh karena itu, saat pelaksanaan SMS, maka tidak ada pilihan bagi Kelompok Tani selain berpartisipasi aktif. Hal ini penting, agar Kelompok Tani mampu membuktikan diri sebagai organisasi, yang ingin mensejahterakan anggotanya.

Ada 6 (enam) kelompok tani di Desa Sendangharjo, yang bersinergi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dalam pelaksanaan SMS di Desa Sendangharjo, yaitu (1) Kelompok Tani “Tirta Mukti” di Dukuh Medang, (2) Kelompok Tani “Tirta Jaya” di Dukuh Sendang, (3) Kelompok Tani “Tirta Makmur” di Dukuh Polaman, (4) Kelompok Tani “Sido Makmur” di Dukuh Kedawung, serta (5) Kelompok Tani “Sidorahayu” dan Kelompok Tani “Sidorukun” di Dukuh Pilangrejo.

Kelima, Pemerintah Kabupaten Blora, yang merupakan pihak pendukung atas pelayanan yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blora kepada masyarakat Blora, termasuk petani Desa Sendangharjo. Peran ini dimainkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora, karena sertipikasi hak atas tanah merupakan salah satu upaya bagi terwujudnya tertib pertanahan, sehingga mampu memberi kemudahan bagi masuknya investasi ke wilayah Kabupaten Blora. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Blora juga berkepentingan memberdayakan petani, karena hal itu merupakan salah satu fungsi Pemerintah Kabupaten Blora. Fungsi ini selanjutnya secara operasional dijalankan oleh Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Perikanan Kabupaten Blora.

Kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Blora mendapat dukungan Pemerintah Kabupaten Blora, karena sektor pertanahan berkewajiban untuk berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan penduduk, yang jumlahnya mencapai 839.384 orang (pada tahun 2012) yang terdiri dari laki-laki sebanyak 415.989 orang dan perempuan sebanyak 423.395 orang. Sementara itu, usia produktif penduduk adalah antara 15 – 64 tahun, yang jumlahnya mencapai 570.584 orang. Banyaknya penduduk usia produktif ini membutuhkan lapangan kerja yang cukup, yang untuk Kabupaten Blora antara lain ditampung di sektor pertanian dan kehutanan. Sektor ini (pertanian dan kehutanan) mampu menampung 314.016 orang tenaga kerja, sedangkan sektor lain (pertambangan, industri olahan, bangunan, perdagangan, angkutan, dan keuangan) mampu menampung 570.584 orang. Seluruh sektor ini pada akhirnya membutuhkan kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, karena tanah (sebagai media tumbuh tanaman dan sebagai space) wajib berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan penduduk.

Keenam, petani Desa Sendangharjo, yang merupakan pihak yang berpartisipasi dalam pelaksanaan SMS, karena merupakan pihak yang menerima manfaat secara langsung. Sebagai contoh, Rochim adalah seorang petani dan warga Dukuh Pilangrejo yang mengikut-sertakan 4 bidang tanah atas nama istrinya (Siti Supriyatun) dalam SMS. Ia menjelaskan bahwa ia tahu SMS dari kepala dukuh, yang kemudian ia ikuti kegiatan tersebut (SMS), karena ia percaya pada kepala dukuh (kamituo). Rochim mengungkapkan, bahwa ia tertarik dengan penjelasan Kepala Dukuh Pilangrejo yang menyatakan tentang pelaksanaan SMS.

Menurut Kepala Dukuh Pilangrejo, SMS dimaksudkan untuk membantu warga (petani di Dukuh Pilangrejo) agar memiliki sertipikat tanah. Oleh karena itu, untuk selanjutnya Rochim melakukan hal-hal sebagai berikut: (1) membayar biaya SMS pada kepala dukuh, (2) melengkapi persyaratan, (3) mengisi daftar isian yang diwajibkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, dan (4) memasang patok batas. Dengan tindakannya ini, Rochim berharap agar sertipikat hak atas tanah atas nama istrinya dapat cepat selesai, karena ia akan mengambil kredit di bank untuk membeli kambing.

Sebetulnya di Desa Sendangharjo ada empat dukuh, yaitu: (1) Dukuh Medang yang kepala-dukuhnya adalah A. Riyadi, (2) Dukuh Sendang yang kepala-dukuhnya adalah Sadikin, (3) Dukuh Kedawung yang kepala-dukuhnya adalah Suparmin, dan (4) Dukuh Pilangrejo yang kepala-dukuhnya adalah Wiwik Suhendro. Khusus untuk Wiwik Suhendro ada peran khusus, di mana ia ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menjadi Sekretaris Panitia Desa yang membantu pelaksanaan SMS di Desa Sendangharjo. Amanat ini diberikan kepadanya, karena ia adalah kepala dukuh termuda, bila dibandingkan dengan kepala dukuh lainnya. Menurut Kepala Desa Sendangharjo, Wiwik Suhendro paling bersemangat dalam bekerja jika dibandingkan dengan kepala dukuh lainnya. Selain itu, Wiwik Suhendro adalah Ketua Kelompok Tani di Dukuh Pilangrejo yang diberi nama Kelompok Tani “Sidorahayu”. Kepala Desa Sendangharjo menyatakan, bahwa Kelompok Tani “Sidorahayu” adalah kelompok tani paling aktif di Desa Sendangharjo, sehingga sempat mendapat perhatian Bupati Blora dan mendapat bantuan ternak kambing bagi para anggotanya.

D. Memaknai Sinergi

Banyak pihak yang memberi makna sinergi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dengan kelompok tani dalam pelaksanaan SMS di Desa Sendangharjo. Masing-masing pihak memberi makna atas sinergi tersebut berdasarkan persepsi, yang dikaitkan dengan kontribusi masing-masing dalam sinergi tersebut, yang antara lain sebagai berikut: **Pertama**, Kantor Pertanahan Kabupaten Blora memberi makna sinergi tersebut sebagai bentuk pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Blora kepada masyarakat, termasuk kepada petani. Sinergi mewujud dalam pelaksanaan SMS (Sertipikasi Massal Swadaya) di Desa Sendangharjo, yang merupakan bentuk kerjasama antara Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dengan kelompok tani dalam memberdayakan petani, dengan memberi jaminan kepastian hukum atas tanah yang dimiliki oleh petani. Tokoh penting di balik kerjasama ini adalah Sri Suharyanto, yang menjabat sebagai Kepala Desa Sendangharjo. Sri Suharyanto memainkan peran penting, ketika membentuk panitia desa dalam pelaksanaan SMS di Desa Sendangharjo.

Djati Harsono (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora) menjelaskan, bahwa bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, sertipikasi hak atas tanah petani melalui kegiatan SMS merupakan sesuatu yang penting. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pelayanan pertanahan yang dapat diberikan kepada masyarakat, termasuk kepada petani. Harapannya adalah agar Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dapat turut berkontribusi bagi upaya memberdayakan petani, selain memberi kepastian hukum bagi hak atas tanah petani. Inilah yang melatar-belakangi pelaksanaan SMS di Desa Sendangkarjo, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora.

Sementara itu, Sriyono (Kepala Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat) menambahkan, bahwa SMS di Desa Sendangharjo dilaksanakan sejak tahun 2011, pada saat Kepala Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat masih dijabat oleh Moch. Agus Salam. Sejak Kepala Desa Sendangharjo mengajukan permohonan bagi pelaksanaan SMS di desanya diketahui, bahwa masyarakat Sendangharjo memang sangat antusias. Hal ini dikarenakan, masyarakat akan menggunakan sertipikat hak atas tanahnya sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit. Bagi masyarakat peserta SMS, yang seluruhnya berprofesi petani, maka kredit yang diperoleh dapat digunakan untuk membeli ternak (misal: kambing) dan untuk modal usaha tani. Usaha ternak kambing dan sapi sangat memungkinkan di desa ini, karena banyak terdapat pakan ternak, yang berupa rumput dan daun-daunan.

Kedua, Pemerintah Desa Sendangharjo memberi makna sinergi tersebut sebagai bentuk pelayanan Pemerintah Desa Sendangharjo kepada masyarakat, termasuk kepada petani di desa ini. Berkaitan dengan hal ini, Sri Suharyanto (Kepala Desa Sendangharjo) menjelaskan, bahwa masyarakat Desa Sendangharjo senang dengan adanya SMS, karena sertipikatnya akan digunakan untuk mendapatkan kredit di bank untuk modal usaha perdagangan ataupun pertanian.

Sri Suharyanto juga menjelaskan, bahwa permohonan pelaksanaan SMS diajukan oleh Pemerintah Desa Sendangharjo tahun 2011, dan selesai tahun 2013. Pemerintah Desa Sendangharjo juga telah bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Blora, di mana Bupati Blora akan menyerahkan sertipikat hak atas tanah hasil kegiatan SMS kepada petani di Desa Sendangharjo pada tanggal 14 Mei 2013.

Walaupun kemudian acara tersebut batal dilaksanakan, karena pada tanggal 14 Mei 2013 Bupati Blora ada acara lain yang tidak dapat diwakilkan.

Ketiga, Panitia Desa untuk pelaksanaan SMS di Desa Sendangharjo memberi makna sinergi tersebut sebagai bentuk pelayanan Panitia Desa untuk pelaksanaan SMS di Desa Sendangharjo kepada masyarakat, termasuk kepada petani di desa ini. Berkaitan dengan hal ini, Wiwik Suhendro menyatakan, bahwa SMS berguna buat petani, karena berarti tanahnya sudah aman, karena tanah itu harta petani satu-satunya. Ia juga menambahkan, bahwa petani juga bisa dapat kredit dari bank dengan menjadikan tanahnya yang telah bersertipikat sebagai jaminan, yang nantinya kredit tersebut digunakan untuk membeli kambing. Sebagaimana diketahui Wiwik Suhendro adalah Kepala Dukuh Pilangrejo, Desa Sendangharjo. Ia juga merangkap sebagai Ketua Kelompok Tani “Sidorahayu”, yang diberi amanat sebagai Sekretaris Panitia Desa untuk pelaksanaan SMS di Desa Sendangharjo.

Keempat, Kelompok Tani memberi makna sinergi tersebut sebagai bentuk dukungan kelompok tani atas perjuangan petani Desa Sendangharjo. Sebagaimana diketahui pelaksanaan SMS di Desa Sendangharjo diperuntukkan bagi anggota Kelompok Tani yang ada di Desa Sendangharjo, yang terdiri dari: (1) Kelompok Tani “Tirta Mukti” di Dukuh Medang, (2) Kelompok Tani “Tirta Jaya” di Dukuh Sendang, (3) Kelompok Tani “Tirta Makmur” di Dukuh Polaman, (4) Kelompok Tani “Sido Makmur” di Dukuh Kedawung, serta (5) Kelompok Tani “Sidorahayu” dan Kelompok Tani “Sidorukun” di Dukuh Pilangrejo.

Kelompok tani Desa Sendangharjo mendorong petani agar tidak merugi, misalnya melalui cara panen yang efisien, agar tidak banyak padi atau jagung yang

terbuang saat panen. Pada umumnya petani sudah faham teknologi pertanian, misalnya traktor, bibit, insektisida, dan lain-lain. Sebagai contoh, petani lebih senang membajak sawahnya dengan traktor, tetapi karena solar dianggap mahal, maka pendapatan petani terancam menurun karena biaya pengolahan yang tinggi. Saat ini (tahun 2013) harga padi dan jagung dianggap baik oleh petani, di mana harga gabah kering dan jagung adalah Rp. 3.000,- per kg. Selain padi dan jagung, petani Desa Sendang harjo juga memproduksi pisang, yang kemudian diolah oleh home industry menjadi makanan khas yang disebut “ledre” (semacam kue semprong), yang harganya satu kotak yang ukurannya relatif agak besar adalah Rp. 60.000,-.

Kelima, Pemerintah Kabupaten Blora memberi makna sinergi tersebut sebagai bentuk pelayanan yang penting dari Kantor Pertanahan, yang perlu didukung oleh Pemerintah Kabupaten Blora. Pentingnya SMS ditandai oleh kesediaan Bupati Blora untuk menyerahkan secara simbolis sertipikat hak atas tanah yang diproses melalui pelaksanaan SMS pada tanggal 14 Mei 2013. Walaupun kemudian, karena ada tugas lain yang tak dapat ditinggalkan, Bupati Blora gagal melaksanakan kesediaannya itu.

Berkat dukungan Bupati Blora, kegiatan SMS di Desa Sendangharjo telah berhasil memproses pensertipikatkan 146 bidang tanah, di mana 131 bidang tanah berhasil disertipikatkan, sedangkan yang 15 bidang tanah belum berhasil disertipikatkan, karena syarat belum dipenuhi (misal: Kartu Tanda Penduduk yang dilampirkan telah “mati”). Sesungguhnya untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, maka administrasi tanah telah diselesaikan terlebih dahulu di tingkat desa. Bupati Blora melalui Kepala Desa

Sendangharjo memberi dukungan kepada peserta SMS yang karena keterbatasan keuangan belum mampu membayar biaya SMS, yang persentasinya mencapai 40 %.

Kegembiraan masyarakat Desa Sendangharjo atas pelaksanaan kegiatan SMS di desa ini nampak dari keinginan mereka merayakan keberhasilan SMS, yang wujudnya berupa upacara penyerahan sertipikat hak atas tanah secara simbolis oleh Bupati Blora, yang direncanakan pada tanggal 14 Mei 2013. Tetapi karena ada tugas lain yang tak dapat ditinggalkan, Bupati Blora gagal mengikuti acara tersebut. Bupati Blora menaruh perhatian pada Desa Sendangharjo, karena desa yang memiliki 1.721 bidang tanah ternyata 1.463 bidang tanahnya telah bersertipikat. Untuk tahun ini (tahun 2013) Desa Sendangharjo juga mendapat jatah PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria) sebanyak 150 bidang. Hanya saja bidang tanah yang dapat diikuti-sertakan pada kegiatan PRONA tahun 2013 adalah bidang-bidang tanah yang tidak berbatasan dengan kawasan hutan yang dikelola Perum Perhutani. Kebijakan ini terpaksa ditetapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, karena Perum Perhutani seringkali tidak bersedia menunjukkan batas, sehingga akan menimbulkan masalah di kemudian hari.

Keenam, petani Desa Sendangharjo memberi makna sinergi tersebut sebagai bentuk pelayanan dari Kantor Pertanahan yang bermanfaat buat petani Desa Sendangharjo. Makna ini nampak dalam penjelasan Rochim (petani Dukuh Pilangrejo) yang berpartisipasi dalam kegiatan SMS, sebagai berikut: Ia mengerti bahwa kegiatan SMS ini bermanfaat buat petani. Pada awalnya ia percaya tentang manfaat pelaksanaan SMS, karena disampaikan oleh orang yang ia percaya, yaitu Wiwik Suhendro yang merupakan Ketua Kelompok Tani “Sidorahayu”, di mana

Rochim adalah anggotanya. Rochim berharap agar sertipikat hak atas tanah atas nama istrinya ini dapat cepat selesai, karena ia akan mengambil kredit di bank untuk membeli kambing.

Sementara itu, Wiwik Suhendro menjelaskan bahwa ikhtiarnya sebagai Ketua Kelompok Tani “Sidorahayu” membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Hal ini dikarenakan adanya tugas tambahan bagi dirinya untuk membantu PPAT (Camat Blora) dalam merenvoi (merevisi luas yang tercantum dalam akta jual beli), karena ada perbedaan luas tanah di akta dengan hasil pengukuran petugas kantor pertanahan. Sebagaimana diketahui, pada awalnya akta jual beli dibuat berdasarkan luas yang tercantum pada letter C, tetapi saat diukur oleh petugas kantor pertanahan hasilnya berbeda, sehingga aktanya harus direnvoi.

Namun demikian Wiwik Suhendro menjelaskan, bahwa kegiatan SMS di Desa Sendangharjo berjalan lancar dalam setiap tahapannya. Wiwik Suhendro menyatakan, bahwa kegiatan SMS di Desa Sendangharjo melalui tahapan, sebagai berikut: (1) sosialisasi, (2) pembentukan Panitia Desa, (3) Warga mendaftar sebagai peserta, (4) Panitia Desa membantu warga melengkapi daftar isian yang dipersyaratkan oleh kantor pertanahan, (5) Panitia Desa berkoordinasi dengan Camat Blora untuk pembuatan akta bagi bidang tanah yang diikuti-sertakan dalam SMS, (6) Menyerahkan seluruh persyaratan peserta SMS ke kantor pertanahan, (7) pelaksanaan pengukuran oleh petugas dari kantor pertanahan, (8) Panitia Desa mendapat data hasil ukur bidang-bidang tanah peserta SMS, (9) Panitia Desa membandingkan data hasil ukur dengan luas yang tercantum pada akta, (10) Panitia Desa menarik kembali akta yang sudah diserahkan ke kantor pertanahan untuk

direnvoi karena adanya perbedaan dengan data hasil ukur, (11) Panitia Desa menyerahkan kembali akta yang telah direnvoi ke kantor pertanahan, (12) pengumuman data bidang tanah dan peserta SMS oleh kantor pertanahan, dan (13) penyerahan sertipikat hak atas tanah oleh kantor pertanahan kepada masyarakat.

B A B IV INTERAKSI DALAM SINERGI

E. Interaksi Para Pihak

Ada beberapa pihak yang saling berinteraksi dalam pelaksanaan SMS di Desa Sendangharjo, yang kemudian “dibaca” sebagai sinergi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dengan kelompok tani dalam memberdayakan petani. Interaksi para pihak dalam sinergi tersebut, antara lain sebagai berikut: **Pertama**, interaksi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dengan Pemerintah Desa Sendangharjo. Interaksi ini merupakan merupakan salah satu interaksi yang dibangun oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blora. Dalam konteks SMS ada lima lokasi SMS pada tahun 2012, yaitu: (1) Desa Sambongrejo, Kecamatan Ngawen, sebanyak 115 bidang; (2) Desa Sendangharjo, Kecamatan Blora, sebanyak 147 bidang; (3) Desa Tawangrejo, Kecamatan Tunjungan, sebanyak 55 bidang; (4) Desa Nglangitan, Kecamatan Tunjungan, sebanyak 217 bidang; (5) Desa Ngrawoh, Kecamatan Kradenan, sebanyak 71 bidang.

Dengan demikian interaksi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dengan Pemerintah Desa Sendangharjo merupakan interaksi yang penting bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, meskipun Desa Sendangharjo bukanlah desa yang mendapat pelayanan SMS dengan jumlah bidang terbanyak. Sebagaimana diketahui desa yang mendapat pelayanan SMS dengan jumlah bidang terbanyak adalah Desa Nglangitan, Kecamatan Tunjungan, yang mendapat pelayanan SMS sebanyak 217 bidang. Sementara itu, desa yang mendapat pelayanan SMS dengan jumlah bidang

paling sedikit adalah Desa Tawangrejo, Kecamatan Tunjungan, yang mendapat pelayanan SMS sebanyak 55 bidang.

Kedua, interaksi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dengan Panitia Desa untuk pelaksanaan SMS di Desa Sendangharjo. Interaksi ini merupakan interaksi yang penting, karena sesungguhnya panitia inilah yang paling berperan dalam pelaksanaan SMS di Desa Sendangharjo. Sebagaimana diketahui untuk memperlancar kegiatan SMS, Pemerintah Desa membentuk Panitia Desa yang diketuai oleh Kepala Desa, sedangkan sekretaris dijabat oleh Wiwik Suhendro. Pada kenyataannya yang paling sibuk menangani SMS di tingkat desa adalah Wiwik Suhendro, selaku sekretaris panitia desa untuk pelaksanaan SMS di Desa Sendangharjo. Oleh karena itu petugas kantor pertanahan banyak berinteraksi (berkomunikasi dan berkoordinasi) dengan Wiwik Suhendro.

Awalnya ada 152 bidang tanah yang diikuti-sertakan oleh petani Desa Sendangharjo dalam kegiatan SMS, tetapi setelah disortir oleh Panitia Desa hanya lolos 148 bidang tanah. Hal ini dikarenakan dari 152 bidang tanah ada 4 bidang tanah yang sedang dalam sengketa batas, sedang dalam sengketa waris, dan tidak memiliki letter C. Sebagaimana diketahui bidang tanah yang tidak memiliki letter C dapat diproses melalui jalur tersendiri, yaitu jalur “permohonan hak atas tanah”. Sementara itu, penetapan batas saat kegiatan SMS dilakukan berdasarkan kesaksian tetangga batas, kepala dukuh, dan kepala desa. Akhirnya dari 148 bidang tanah yang diikuti-sertakan dalam kegiatan SMS, hanya 146 bidang tanah yang menurut Kantor Pertanahan Kabupaten Blora memenuhi syarat untuk diproses.

Ketiga, interaksi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dengan kelompok tani di Desa Sendangharjo. Interaksi ini difasilitasi oleh Kepala Desa Sendangharjo, yang mempertemukan Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dengan kelompok tani di Desa Sendangharjo. Pada situasi itu, Kepala Desa Sendangharjo berinisiatif untuk melibatkan kelompok tani dalam kegiatan SMS yang dikelola oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blora. Fasilitasi Kepala Desa Sendangharjo merupakan sesuatu yang penting, karena memberi peluang bagi terjadinya sinergi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dengan kelompok tani.

Tokoh kelompok tani yang intens berinteraksi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Blora adalah Wiwik Suhendro, yang diserahi tugas oleh Kepala Desa Sendangharjo sebagai sekretaris Panitia Desa untuk pelaksanaan SMS di Desa Sendangharjo. Sebagaimana diketahui selain sebagai Kepala Dukuh Pilangrejo, Wiwik Suhendro juga Ketua Kelompok Tani “Sidorahayu”. Interaksi antara Wiwik Suhendro dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Blora tidak hanya memberi kesempatan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Blora untuk bersinergi dengan Kelompok Tani “Sidorahayu” (Dukuh Pilangrejo), melainkan dengan seluruh kelompok tani yang ada di Desa Sendangharjo, yaitu: yaitu (1) Kelompok Tani “Tirta Mukti” di Dukuh Medang, (2) Kelompok Tani “Tirta Jaya” di Dukuh Sendang, (3) Kelompok Tani “Tirta Makmur” di Dukuh Polaman, (4) Kelompok Tani “Sido Makmur” di Dukuh Kedawung, serta (5) Kelompok Tani “Sidorahayu” dan Kelompok Tani “Sidorukun” di Dukuh Pilangrejo.

Keempat, interaksi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dengan Pemerintah Kabupaten Blora. Interaksi ini telah berlangsung lama, atau tidak baru

kali ini saja (saat pelaksanaan SMS di Desa Sendangharjo). Interaksi antara keduanya sudah sejak lama terjadi, terutama dalam menangani konflik pertanahan di Kabupaten Blora. Interaksi antara keduanya juga berhasil mendukung penyelesaian konflik pertanahan melalui mediasi, sehingga hanya sedikit konflik pertanahan yang diproses melalui jalur pengadilan. Selain itu, PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria) di Kabupaten Blora juga merupakan kegiatan yang didukung oleh Pemerintah Kabupaten Blora. Pada tahun 2012 sebanyak 1.500 bidang tanah telah disertipikatkan melalui pelaksanaan PRONA di kabupaten ini. Demikian pula halnya pada tahun 2013, sedang disertipikatkan 1.500 bidang tanah melalui pelaksanaan PRONA.

Saat pelaksanaan SMS di Desa Sendangharjo, interaksi antara Pemerintah Kabupaten Blora dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Blora nampak pada adanya seruan dari Bupati Blora, agar Kepala Desa Sendangharjo dan Camat Blora mendukung dan membantu pelaksanaan SMS di Desa Sendangharjo. Dukungan diberikan, karena pelaksanaan SMS relevan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Blora dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Hal ini antara lain dibuktikan dengan adanya antusiasme Camat Blora, dalam membuat akta yang digunakan sebagai bukti peralihan hak atas tanah.

Kelima, interaksi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dengan petani Desa Sendangharjo. Interaksi ini nampak, saat para petani desa ini berpartisipasi dalam pelaksanaan SMS di Desa Sendangharjo. Kekuatan interaksi terlihat, saat sertipkat hak atas tanah yang diterbitkan melalui pelaksanaan SMS di Desa Sendangharjo dipersepsi sebagai sesuatu yang bermanfaat oleh petani. Pemanfaatan

ini antara lain meliputi perolehan kredit oleh petani, yang dapat digunakan sebagai modal usaha tani. Selain itu, kredit yang diperoleh petani juga dapat digunakan untuk membeli ternak, seperti kambing atau sapi.

Sutrisno (anggota Kelompok Tani “Sidorahayu”) menjelaskan, bahwa modal usaha tani merupakan sesuatu yang penting. Ia menjelaskan bahwa biaya menanam padi (sampai dengan Mei 2013) meliputi: (1) biaya pupuk, yang terdiri dari: (a) pupuk urea sebanyak 1 kuintal di mana harganya mencapai Rp. 98.000,- per 50 kg; (b) pupuk ponska sebanyak 50 kg di mana harganya mencapai Rp. 120.000,- per 50 kg; dan (c) pupuk SP-36 sebanyak 50 kg di mana harganya Rp. 130.000,- per 50 kg; (2) biaya sewa traktor Rp. 200.000,- per 1 kali garap; (3) biaya mencangkul Rp. 60.000,-; (4) biaya buruh tani Rp. 110.000,-; dan (5) biaya pestisida dan operatornya Rp. 100.000,-.

Pentingnya modal usaha tani, membuat petani Desa Sendangharjo antusias mengikuti kegiatan SMS, yang berarti menguatkan interaksi antara petani desa ini dengan Kantor Pertanahan Babupaten Blora. Antusiasme petani juga didukung oleh adanya sosialisasi SMS yang dilakukan oleh Panitia Desa di Balai Desa, yang isinya berupa penjelasan tentang SMS. Panitia Desa menjelaskan, bahwa kegiatan SMS dimaksudkan untuk membantu warga (petani) agar memiliki sertipikat hak atas tanah. Selain itu, sosialisasi kegiatan SMS juga diisi dengan acara musyawarah dalam mendukung pelaksanaan kegiatan SMS di Desa Sendangharjo, termasuk musyawarah dalam hal biaya SMS yang ditetapkan oleh Panitia Desa. Sebagaimana diketahui, biaya yang harus dikeluarkan oleh petani peserta SMS bervariasi antara Rp. 1 – 2 juta. Contoh, untuk sawah seluas 2.452 meter persegi dikenakan biaya

sebesar Rp. 1.160.000,- sedangkan pekarangan seluas 702 meter persegi dikenakan biaya Rp. 1 juta.

Petani Desa Sendangharjo antusias mengikuti SMS, karena persyaratannya relatif mudah, yaitu: (1) foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang dilegalisir pemerintah desa, (2) foto copy KK (Kartu Keluarga) yang dilegalisir pemerintah desa, (3) foto copy bukti pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) yang dilegalisir pemerintah desa, dan bila diperlukan Surat Keterangan Waris yang diketahui pemerintah desa. Sementara itu, pengisian blanko persyaratan yang ditetapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, dalam pelaksanaannya dibantu oleh Panitia Desa. Saat petugas ukur datang, pemilik tanah (petani) juga antusias menunjukkan batas tanah dengan disaksikan tetangga yang berbatasan dan kepala dukuh. Petani juga tidak kesulitan dengan akta jual beli yang dipersyaratkan, karena penandatanganan akta dilakukan oleh pemilik tanah (pembeli) dan yang namanya ada di akta (penjual) dengan dibimbing oleh Panitia Desa.

Keenam, interaksi antara Pemerintah Desa Sendangharjo dengan Panitia Desa untuk pelaksanaan SMS di Desa Sendangharjo. Interaksi ini terlihat pada komunikasi yang intens antara Kepala Desa (yang juga ketua panitia desa) dengan sekretaris panitia desa yang dijabat oleh Wiwik Suhendro (Kepala Dukuh Pilangrejo dan Ketua Kelompok Tani “Sidorahayu”). Interaksi antara kedua tokoh ini (Sri Suharyanto dengan Wiwik Suhendro) menghasilkan dukungan Pemerintah Desa Sendangharjo terhadap tugas Panitia Desa, dalam mendukung pelaksanaan SMS di desa ini.

Pada akhirnya interaksi antara Pemerintah Desa Sendangharjo dengan Panitia Desa untuk pelaksanaan SMS di Desa Sendangharjo memberi manfaat bagi petani

Desa Sendangharjo. Sebagai contoh, Rochim (suami dari Siti Supriyatun) yang 4 bidang tanahnya (atas nama Siti Supriyatun) diikut sertakan dalam kegiatan SMS. Bagi Rochim interaksi antara Pemerintah Desa Sendangharjo dengan panitia desa untuk pelaksanaan SMS di Desa Sendangharjo memberi manfaat baginya. Meskipun untuk itu Rochim harus membayar biaya SMS dengan perincian, sebagai berikut: (1) untuk satu bidang tanahnya yang berupa tegalan dengan luas 3.077 meter persegi, ia harus membayar Rp. 1.200.000,-; (2) untuk satu bidang tanah yang berupa pekarangan dengan luas 1.900 meter persegi, ia harus membayar Rp. 1.000.000,-; (3) untuk satu bidang tanahnya yang berupa sawah dengan luas 2.392 meter persegi, ia harus membayar Rp. 1.100.000,-; dan (4) untuk satu bidang tanah yang berupa sawah dengan luas 2.130 meter persegi, ia harus membayar Rp. 1.100.000,-. Rochim bersedia membayar biaya SMS untuk empat bidang tanahnya, karena tanah tegalannya ditanami pohon jati dan jagung, di mana pohon jatinya dapat dijual untuk membayar biaya SMS. Sementara itu, rumah yang ditempatinya dibangun di tanah pekarangan, sedangkan tanah sawahnya dapat ditanami padi sebanyak 2 kali dan palawija sebanyak 1 kali dalam satu tahun.

Ketujuh, interaksi antara Pemerintah Desa Sendangharjo dengan kelompok tani di Desa Sendangharjo. Interaksi ini sesungguhnya telah terjadi sejak dibentuknya 6 (enam) kelompok tani di Desa Sendangharjo, yaitu (1) Kelompok Tani “Tirta Mukti” di Dukuh Medang, (2) Kelompok Tani “Tirta Jaya” di Dukuh Sendang, (3) Kelompok Tani “Tirta Makmur” di Dukuh Polaman, (4) Kelompok Tani “Sido Makmur” di Dukuh Kedawung, serta (5) Kelompok Tani “Sidorahayu” dan Kelompok Tani “Sidorukun” di Dukuh Pilangrejo. Oleh karena itu, pelaksanaan

SMS di desa ini semakin meneguhkan interaksi antara Pemerintah Desa Sendangharjo dengan 6 kelompok tani ini.

Interaksi mewujud dalam bentuk dukungan Pemerintah Desa Sendangharjo bagi segenap aktivitas kelompok tani yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Dukungan semacam ini juga diberikan Pemerintah Desa Sendangharjo atas sinergi Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dengan kelompok tani, dalam memberdayakan petani Desa Sendangharjo. Hal ini menurut Wiwik Suhendro (Ketua Kelompok Tani “Sidorahayu”) sangat berarti bagi petani Desa Sendangharjo, karena sertipikat hak atas tanah yang ada pada petani akan memberinya kesempatan untuk mengakses kredit.

Wiwik Suhendro menuturkan, sebenarnya hasil tani para petani Desa Sendangharjo tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Oleh karena itu, ada sebagian petani yang memiliki pekerjaan lain selain petani, misalnya pedagang, buruh, atau pekerjaan lain yang halal. Namun demikian para petani Desa Sendangharjo pada umumnya memiliki pohon jati, yang berguna sebagai tabungan bagi mereka. Bila ada ada keperluan penting yang membutuhkan biaya, maka pohon jati inilah yang biasanya dijual. Oleh karena itu, keberadaan sertipikat hak atas tanah yang mampu memberi akses kredit bagi petani, akan membuat petani mengesampingkan pilihan untuk menjual jatinya.

Kedelapan, interaksi antara Pemerintah Desa Sendangharjo dengan Pemerintah Kabupaten Blora. Interaksi ini mewujud dalam bentuk dorongan Pemerintah Kabupaten Blora bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Sendangharjo. Unit kerja Pemerintah Kabupaten Blora yang beberapa kali

berinteraksi dengan Pemerintah Desa Sendangharjo adalah Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan Kabupaten Blora. Telah sejak lama unit kerja Pemerintah Kabupaten Blora ini berupaya meningkatkan kesejahteraan petani, sehingga selalu berinteraksi dengan Pemerintah Desa Sendangharjo.

Sementara itu, Pemerintah Desa Sendangharjo berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat (termasuk petani) dengan memanfaatkan segenap potensi yang ada, misalnya dengan memanfaatkan “tanah keraman”. Sebagaimana diketahui “tanah keraman”, adalah bidang-bidang tanah sawah yang dibagikan kepada rakyat pada masa Hindia Belanda. Pihak yang membagikan tanah adalah pemerintah desa pada masa itu, yang tujuannya untuk mendapatkan pajak dari rakyat. Saat ini tanah keraman masih digarap oleh masyarakat secara turun temurun, di mana luas satu bidang tanah keraman bervariasi antara 3.000 – 3.500 meter persegi, yang hasilnya berupa 17 kuintal padi untuk satu kali panen.

Selain itu, di Desa Sendangharjo juga ada hutan rakyat yang ditanami pohon jati, yang umurnya rata-rata 8 tahun, dan baru akan ditebang bila si pemilik pohon membutuhkan uang, dengan harga Rp. 25.000 untuk jati berdiameter 21 cm dengan panjang 4 meter. Khusus untuk petani yang memiliki hutan rakyat, yang berupa pohon jati yang ditanam di tegalan, ada kelompok tani tersendiri, yaitu Kelompok Tani “Jati Mustika”. Atas dukungan Kementerian Kehutanan, pada tahun 2011 ada seruan dari Pemerintah Kabupaten Blora, agar petani menunda penebangan pohon jatinya, supaya pohon jatinya dapat tumbuh lebih besar. Seruan ini dipatuhi oleh petani, karena Kementerian Kehutanan menawarkan kredit bagi mereka yang memiliki pohon jati, yang besarnya kredit tergantung jumlah pohon jati yang

dimiliki. Sebelumnya, pada tahun 2004, atas dukungan Kementerian Kehutanan, Pemerintah Kabupaten Blora melakukan gerakan penanaman hutan rakyat, dengan memberi bantuan bibit pohon jati.

Kesembilan, interaksi antara Pemerintah Desa Sendangharjo dengan petani Desa Sendangharjo. Interaksi ini telah lama mewujud dalam bentuk pelayanan Pemerintah Desa Sendangharjo kepada petani di desa ini, dan dalam bentuk partisipasi petani di desa ini atas segenap kegiatan yang digagas dan didukung Pemerintah Desa Sendangharjo. Salah satu kegiatan yang didukung oleh Pemerintah Desa Sendangharjo adalah SMS yang digagas oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blora. Dalam konteks SMS, interaksi antara Pemerintah Desa Sendangharjo dengan petani Desa Sendangharjo mewujud dalam bentuk: (1) pembentukan panitia desa untuk pelaksanaan SMS di Desa Sendangharjo; dan (2) pelayanan Pemerintah Desa Sendangharjo kepada petani, ketika petani berikhtiar memenuhi persyaratan berupa berbagai keterangan atas tanah yang dimiliki.

Menurut M. Nurcholis (petani Desa Sendangharjo) kegiatan SMS sangat membantu dirinya dalam memperoleh sertipikat hak atas tanah. Pada kegiatan SMS tersebut ia mengikut-sertakan untuk satu bidang tanahnya dengan luas 1.500 meter persegi. Tanah ini berupa tegalan yang ditanami pohon jati dan jagung, di mana ia dikenai biaya SMS sebesar Rp. 1.200.000,-. Bagi M. Nurcholis dukungan Pemerintah Desa Sendangharjo pada petani Desa Sendangharjo juga ditunjukkan ketika Pemerintah Desa Sendangharjo mendukung kegiatan kelompok tani. Sebagaimana diketahui atas kelompok tani bekerjasama dengan Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Perikanan Kabupaten Blora secara berkala

menyelenggarakan SLPT (Sekolah Lapang Pertanian Terpadu) yang mengajarkan tentang pembibitan jagung dengan disertai pemberian bantuan yang berupa bibit jagung.

Atas dukungan Pemerintah Desa terhadap petani, maka kelompok tani seperti Kelompok Tani “Sidorahayu” secara rutin dapat menyelenggarakan pertemuan kelompok tani satu kali dalam satu bulan, untuk membahas kondisi tanaman di sawah atau di tegalan, dengan dibimbing penyuluh pertanian. Dengan jumlah anggota Kelompok Tani “Sidorahayu” Dukuh Pilangharjo Desa Sendangharjo sebanyak 50 orang petani, maka kegiatan ini sangat bermanfaat bagi 50 keluarga di Desa Sendangharjo. Selain itu, pada tahun 2011 Kelompok Tani “Sidorahayu” mendapat bantuan uang dari Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Perikanan Kabupaten Blora untuk membeli 10 ekor kambing, yang akan dibagikan kepada anggota kelompok tani ini.

Oleh Ketua Kelompok Tani (Wiwik Suhendro) uang itu kemudian dibelikan kambing yang ukurannya lebih kecil, sehingga berhasil mendapatkan 20 ekor kambing, sehingga dapat diserahkan kepada 20 orang petani. Dengan kata lain inisiatif Ketua Kelompok Tani “Sidorahayu” ini memberi kesempatan bagi perluasan pihak (lebih banyak pihak) yang menerima bantuan kambing. Kalau sesuai petunjuk dari Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Perikanan Kabupaten Blora yang dapat bantuan hanya 10 orang petani. Tetapi dengan inisiatif Ketua Kelompok Tani yang dapat bantuan jadi lebih banyak yaitu 20 orang petani. Inisiatif ini selanjutnya dilaporkan oleh Ketua Kelompok Tani “Sidorahayu” kepada Kepala Dinas Pertanian,

Peternakan, Perkebunan, dan Perikanan Kabupaten Blora dan rombongan pada saat upacara penyerahan bantuan.

Kesepuluh, interaksi antara Panitia Desa untuk pelaksanaan SMS di Desa Sendangharjo dengan kelompok tani. Interaksi ini mewujud dalam bentuk kerjasama antara keduanya untuk menyukseskan kegiatan SMS di Desa Sendangharjo. Panitia desa memeriksa kelengkapan berkas petani sebelum diserahkan kepada tim SMS dari Kantor Pertanahan Kabupaten Blora. Sementara itu, kelompok tani membimbing dan mendorong petani, agar melengkapi berkas SMS-nya sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blora.

Ketua Kelompok Tani “Sidorahayu” (Wiwik Suhendro) yang juga sekretaris Panitia Desa untuk pelaksanaan SMS di Desa Sendangharjo menjelaskan, bahwa kerjasama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Blora telah menguntungkan kelompok tani, karena petani atau anggota kelompok tani dapat mensertipikatkan tanahnya. Sertipikat ini nantinya dapat digunakan untuk tambahan modal usaha pertanian, atau peternakan, misalnya untuk membeli kambing. Hal inilah yang dirasakan oleh petani Desa Sendangharjo pada saat ikut-serta dalam kegiatan SMS pada tahun 2012. Kegiatan SMS yang lancar ini telah mendorong Kantor Pertanahan Kabupaten Blora untuk meletakkan PRONA tahun 2013 di Desa Sendangharjo untuk 150 bidang tanah yang ada di desa ini.

Bimbingan yang dilakukan petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Blora kepada Ketua Kelompok Tani “Sidorahayu” (Wiwik Suhendro) yang juga sekretaris Panitia Desa untuk pelaksanaan SMS di Desa Sendangharjo telah membuat yang bersangkutan mampu membimbing petani yang ikut-serta dalam kegiatan SMS.

Wiwik Suhendro menjelaskan, bahwa selama kegiatan SMS dirinya dibimbing oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, agar mampu mengarahkan petani agar berkenan memenuhi persyaratan SMS (2012), termasuk sekarang yang berkaitan dengan upaya untuk memenuhi persyaratan PRONA (2013). Selain itu, Wiwik Suhendro juga menjelaskan, bahwa ia juga dibimbing untuk menyelesaikan sengketa, misal sengketa waris atau sengketa batas. Sementara itu diketahui, bahwa kegiatan SMS ini dapat membantu petani untuk pengembangan usahanya, untuk modal usaha pertanian, atau untuk modal usaha peternakan (misal membeli kambing).

Kesebelas, interaksi antara Panitia Desa untuk pelaksanaan SMS di Desa Sendangharjo dengan Pemerintah Kabupaten Blora. Interaksi ini terjadi secara tidak langsung, di mana keduanya berinteraksi melalui Pemerintah Desa Sendangharjo, yang mendapat dukungan Pemerintah Kabupaten Blora bagi setiap kegiatan yang dapat menyejahterakan petani. Termasuk dalam hal ini, pelaksanaan SMS di Desa Sendangharjo. Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa interaksi antara panitia desa dengan Pemerintah Kabupaten Blora mewujud dalam bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Blora atas pelaksanaan tugas panitia desa.

Interaksi Panitia Desa dan Pemerintah Kabupaten Blora secara faktual bertemu pada “titik” yang sama, yaitu petani Desa Sendangharjo. Panitia Desa bekerja membantu petani Desa Sendangharjo memperoleh sertipikat hak atas tanahnya, yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan petani. Demikian pula dengan Pemerintah Kabupaten Blora, yang melalui Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Perikanan Kabupaten Blora terus menerus membantu petani Desa Sendangharjo.

Wiwik Suhendro (sekretaris Panitia Desa) menjelaskan, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan pertanian tidak ada dukungan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Blora. Dukungan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pertanian datang dari Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan Kabupaten Blora. Sementara itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Blora fokus pada upaya sertifikasi hak atas tanah petani Desa Sendangharjo, di mana sertifikat tanahnya dapat dimanfaatkan untuk memperoleh kredit bank, yang selanjutnya dapat digunakan untuk menambah modal usaha tani.

Sebagaimana diketahui petani memerlukan pupuk, pestisida, dan sewa traktor, sehingga petani membutuhkan modal usaha yang cukup. Adanya kredit bank dengan jaminan sertifikat tanah akan sangat membantu petani dalam memenuhi kebutuhan modal usaha taninya. Ikhtiar pengurangan biaya produksi telah dilakukan oleh petani, agar modal usaha tidak terlalu besar, tetapi para petani melakukannya dengan sangat hati-hati karena khawatir mengalami gagal panennya. Dalam rangka “yang penting selamat” (safety first), petani tetap membutuhkan bibit, pupuk, dan pestisida dalam jumlah yang cukup supaya panennya meningkat.

Semangat “menyelamatkan panen” inilah yang hingga saat ini masih diperagakan oleh petani Desa Sendangharjo, yang produk utamanya adalah padi. Namun demikian, sesungguhnya masih ada peluang bagi petani untuk menyelamatkan produksinya, karena (menurut Wiwik Suhendro) petani Desa Sendangharjo belum memperhatikan atau mengabaikan padi yang tercecer pada saat panen. Selain itu, menurut Wiwik Suhendro, petani Desa Sendangharjo juga belum memiliki produk olahan hasil pertanian yang dapat diunggulkan, yang sesungguhnya dapat menjadi “jalan” bagi petani dalam meningkatkan kesejahteraannya. Sementara

itu, produktivitas tanah sawah dengan luas 2.500 meter persegi adalah panen padi dua kali dan panen palawija satu kali dalam satu tahun. Untuk satu kali panen padi diperoleh hasil sebanyak 12 kuintal gabah kering yang harganya Rp. 3.000,- per kg. Dengan demikian untuk dua kali panen dapat diperoleh 24 kuintal gabah kering. Sementara itu, untuk satu kali panen palawija (jagung) diperoleh hasil sebanyak 4 kuintal yang harganya Rp. 2.700 per kg. Produktivitas ini memberi hasil kepada petani berupa uang sebesar Rp. 8.280.000,- per tahun untuk tanah sawah seluas 2.500 meter persegi.

Kedua-belas, interaksi antara Panitia Desa untuk pelaksanaan SMS di Desa Sendangharjo dengan petani Desa Sendangharjo. Interaksi ini mewujud dalam bentuk pelayanan dan partisipasi, di mana Panitia Desa melayani petani dengan memeriksa kelengkapan berkas petani sebelum diserahkan kepada tim SMS dari Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, sedangkan petani berpartisipasi dalam melengkapi berkas atas tanah yang dimilikinya dengan sebaik-baiknya. Salah seorang petani, yaitu Sutrisno, menjelaskan bahwa SMS ini penting, karena ia akan mendapat sertipikat hak atas tanah. Baginya sertipikat hak atas tanah merupakan sesuatu yang penting, agar tanahnya tidak digugat oleh orang lain. Sutrisno menambahkan, bahwa ada dua bidang tanahnya yang diikutsertakan dalam pelaksanaan SMS di Desa Sendangharjo, yaitu: sawah seluas 2.452 meter persegi, dan pekarangan seluas 702 meter persegi. Sawah seluas 2.452 meter persegi bisa panen padi dua kali dan palawija satu kali. Untuk sawah, panen padi 2 kali setahun, setiap kali panen dapat 12 kuintal gabah kering, yang harganya Rp. 3.000,- per kg.

Sementara itu, panen palawija dapat dicapai satu kali dalam setahun, yang setiap kali panen dapat 4 kuintal jagung yang harganya Rp. 2.700,- per kg.

Dengan demikian diketahui bahwa dalam satu tahun, Sutrisno mendapatkan hasil dari menanam padi (di atas tanah sawahnya yang seluas 2.452 meter persegi) sebesar Rp. 7.200.000,-. Padahal untuk satu kali tanam padi, ia membutuhkan biaya: (1) Pupuk: (a) urea 1 kuintal dengan harga Rp. 98.000,- per 50 kg; (b) ponska 50 kg dengan harga Rp. 120.000,- per 50 kg; (c) SP-36 50 kg dengan harga Rp. 130.000,- per 50 kg; (2) sewa traktor Rp. 200.000,- per 1 kali garap; (3) mencangkul Rp. 60.000,-; (4) buruh tani Rp. 110.000,-; (5) pestisida dan operatornya Rp. 100.000,-. Dengan demikian untuk satu kali tanam padi ia membutuhkan biaya sebesar Rp. 916.000,- di mana biaya ini belum termasuk biaya bibit, sehingga kalau dua kali tanam dibutuhkan biaya sebesar Rp. 1.832.000,-.

Ketika hasil panen dibandingkan dengan biaya produksi, diketahui bahwa untuk dua kali menanam padi di atas tanah sawahnya, Sutrisno mendapat keuntungan sebesar Rp. 5.368.000,- dalam waktu 8 bulan, di mana biaya bibit belum dihitung. Kondisi ini menunjukkan, bahwa apabila biaya bibit tidak dihitung maka dalam satu bulan petani seperti Sutrisno hanya mendapat keuntungan sebesar Rp. 671.000,-. Keuntungan sebesar ini tentu saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dalam satu bulan, sehingga para petani (termasuk Sutrisno) harus memiliki penghasilan tambahan.

Ketiga-belas, interaksi antara kelompok tani dengan Pemerintah Kabupaten Blora. Interaksi ini mewujud dalam interaksi antara kelompok tani dengan Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan Kabupaten Blora. Menurut Wiwik Suhendro

(Ketua Kelompok Tani “Sidorahayu”), telah banyak ikhtiar yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan Kabupaten Blora bagi peningkatan kesejahteraan petani, melalui pemberdayaan kelompok tani. Tetapi Wiwik Suhendro mengkritik dinas ini, karena tidak berkenan membantu kelompok tani di Desa Sendangharjo, yang membutuhkan bantuan untuk tanaman cabai dan melon. Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan Kabupaten Blora tidak berkenan membantu, dengan alasan tidak ada program bantuan bagi petani untuk tanaman cabai dan melon. Padahal kelompok tani Desa Sendangharjo butuh bimbingan melalui SLPT (Sekolah Lapang Pertanian Terpadu) yang biasa diselenggarakan oleh dinas ini untuk tanaman cabai dan melon. Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan Kabupaten Blora menjelaskan, bahwa mereka hanya mempunyai program bantuan bagi kelompok tani untuk tanaman padi.

Sementara itu, interaksi antara kelompok tani dengan Pemerintah Kabupaten Blora dalam konteks pelaksanaan SMS di Desa Sendangharjo mewujud dalam bentuk dukungan. Pemerintah Kabupaten Blora mendukung pelaksanaan SMS di Desa Sendangharjo yang merupakan sinergi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dengan kelompok tani dalam memberdayakan petani. Bentuk dukungan diperlihatkan ketika Bupati Blora menyampaikan kepada Kepala Desa Sendangharjo tentang kesediaannya untuk hadir dalam upacara penyerahan sertifikat hak atas tanah hasil SMS. Walaupun kemudian acara tersebut batal dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2013, karena Bupati Blora ada acara lain yang tidak dapat diwakilkan.

Keempat-belas, interaksi antara kelompok tani dengan petani Desa Sendangharjo. Interaksi ini mewujud dalam bentuk partisipasi petani dalam berbagai

kegiatan kelompok tani, termasuk kegiatan SMS yang pelaksanaannya didukung oleh kelompok tani. Sebagai contoh, dapat diperhatikan penjelasan Rochim, yang merupakan suami dari Siti Supriyatun (salah seorang peserta SMS). Rochim menjelaskan bidang tanah yang ia ikut sertakan dalam kegiatan SMS adalah bidang tanah yang kepemilikannya di atas-namakan pada istrinya (Siti Supriyatun). Ia dapat melakukan hal itu, karena ia adalah anggota Kelompok Tani “Sidorahayu”. Rochim juga menjelaskan, bahwa ia aktif mengikuti kegiatan kelompok tani, seperti SLPT (Sekolah Lapang Pertanian Terpadu) yang mengajarkan tentang pembibitan. Aktivitasnya ia mendapat berkah ketika ia termasuk salah seorang anggota kelompok tani yang mendapat bantuan bibit. Selain itu, pada tahun 2011, ia juga mendapat bantuan kambing sebanyak 1 ekor dari Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Perikanan Kabupaten Blora, yang disalurkan melalui kelompok tani.

Wiwik Suhendro (Ketua Kelompok Tani “Sidorahayu”) menjelaskan, bahwa hasil panen petani ada sebagian yang dibawa ke Pasar Blora, tetapi sebagian besar dijual pada tengkulak di lokasi panen. Petani kalau mengandalkan hasil taninya tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Oleh karena itu, kebanyakan petani Desa Sendangharjo mempunyai penghasilan lain selain bertani, misalnya dengan cara berdagang kecil-kecilan, seperti menjual makanan dengan menggunakan sepeda atau pakai sepeda motor, atau dengan menjadi buruh serabutan.

Sebagaimana diketahui tanah sawah di Desa Sendangharjo ditanami padi dan palawija, sedangkan tanah tegalan ditanami palawija dan pohon jati. Wiwik Suhendro menyatakan, bahwa pohon jati inilah yang digunakan sebagai tabungan oleh petani. Pohon jati akan dijual oleh petani, bila ia memerlukan uang untuk biaya

sekolah anaknya atau keperluan lainnya. Wiwik Suhendro juga menjelaskan, bahwa usaha Kelompok Tani “Sidorahayu” bervariasi, karena ada anggota yang memiliki sawah dan ada pula anggota yang memiliki tegalan. Ada anggota yang menanam tegalannya dengan pohon jati, dan ada juga anggota Kelompok Tani “Sidorahayu” yang menanam tegalannya dengan ketela pohon untuk dijual ke pabrik tepung tapioka. Tetapi produk yang paling diandalkan oleh petani yang tergabung dalam Kelompok Tani “Sidorahayu” adalah padi. Namun demikian dapatlah dikatakan, bahwa Kelompok Tani “Sidorahayu” memproduksi padi, jagung, kayu jati, dan ketela pohon.

Kelima-belas, interaksi antara Pemerintah Kabupaten Blora dengan petani Desa Sendangharjo. Interaksi ini mewujud dalam bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Blora bagi peningkatan kesejahteraan petani di desa ini. Pemerintah Kabupaten Blora melalui Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Perikanan Kabupaten Blora kerap kali memberi bantuan bibit dan pelatihan (melalui SLPT) bagi petani. Selain itu dinas ini juga memberi bantuan kambing bagi petani pada tahun 2011, untuk mendukung peningkatan kesejahteraan petani. Sementara itu, berkaitan dengan kegiatan SMS, Bupati Blora memberi dukungan bagi pelaksanaan kegiatan ini di Desa Sendangharjo, ketika Kepala Desa Sendangharjo berkesempatan menghadap Bupati Blora. Pada kesempatan itu, Bupati Blora menyampaikan keinginannya untuk menyerahkan secara simbolis sertifikat hak atas tanah hasil kegiatan SMS pada tanggal 14 Mei 2013. Walaupun kemudian acara tersebut batal dilaksanakan, karena Bupati Blora ada acara lain yang tidak dapat diwakilkan.

Selama ini dukungan Pemerintah Kabupaten Blora bagi petani Desa Sendangharjo disalurkan melalui Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Perikanan Kabupaten Blora. Dukungan ini diperlukan oleh para petani Desa Sendangharjo karena kondisi mereka memang masih membutuhkan bantuan. Hal ini diungkapkan oleh Muri (peserta SMS dan Bendahara Kelompok Tani “Sidorahayu”), yang juga menjelaskan bahwa ia memiliki satu bidang tanah seluas 3.570 meter persegi yang berupa tegalan dan ditanami pohon jati dan jagung. Bidang tanah itulah yang ia ikut-sertakan dalam kegiatan SMS, dan dikenai biaya SMS sebesar Rp. 1.200.000,- tetapi karena kondisi keuangannya belum memungkinkan ia baru membayar Rp. 400.000,-. Ia menjelaskan bahwa pelunasan biaya akan dilakukan setelah sertipikat hak atas tanahnya terbit.

Muri aktif mengikuti kegiatan di kelompok taninya, karena ia menjabat bendahara kelompok tani. Tetapi karena penghasilannya dari pertanian tidak mencukupi, maka untuk mencukupi kebutuhan keluarganya ia menjadi buruh bangunan, yang menurut Muri hasilnya lumayan. Tanah tegalannya, ia tanami jagung dan pohon jati, yang dalam setahun ia dapat memanen jagung sebanyak dua kali. Pada setiap kali panen, ia mendapat 5 kuintal jagung yang harganya Rp. 2.700,- per kg, sedangkan pohon jatinya dijual hanya bila ia membutuhkan uang, misalnya untuk biaya anak sekolah. Kayu jati dihargai Rp. 25.000,- untuk diameter 21 cm dengan panjang 4 meter, dan harganya akan lebih tinggi bila ukuran kayu jatinya lebih besar. Pada saat ada bantuan kambing dari Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan Kabupaten Blora, Muri mendapat bantuan satu ekor kambing. Baginya memelihara kambing itu mudah, karena itu ia berkeinginan kalau nanti sertipikatnya sudah

keluar, ia ingin mengambil kredit bank, untuk membeli kambing, sebagai bentuk usaha ternak kecil-kecilan.

F. Penyempurnaan Makna Sinergi

Sinergi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dengan kelompok tani dalam memberdayakan petani, yang telah dimaknai oleh para pihak, kemudian disempurnakan maknanya seiring dengan berlangsungnya interaksi mereka. Makna dibangun sebagai persepsi atas sinergi tersebut dalam konteks kontribusi masing-masing pihak, sebagai berikut: **Pertama**, pada awalnya Kantor Pertanahan Kabupaten Blora memaknai sinergi tersebut, sebagai bentuk pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Blora kepada masyarakat, termasuk kepada petani. Selanjutnya, seiring dengan berlangsungnya interaksi para pihak yang terjadi dalam kegiatan SMS, sinergi tersebut oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dimaknai, sebagai suatu keharusan bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, untuk bertindak (berkegiatan) memberdayakan masyarakat termasuk petani.

Sriyono (Kepala Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat) menjelaskan, bahwa awalnya kegiatan SMS ini untuk tertib pertanahan, tetapi seiring berjalannya waktu, kegiatan SMS ini ternyata juga bisa jadi bagian pemberdayaan masyarakat atau petani. Oleh karena sertifikat hak atas tanah dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan kredit bagi usaha tani atau usaha peternakan, maka hal ini menunjukkan adanya sentuhan agribisnis kantor pertanahan bagi masyarakat, khususnya bagi petani di Desa Sendangharjo. Dengan kata lain Kantor Pertanahan Kabupaten Blora telah memberdayakan petani melalui jalur penguatan asset dan pemberian akses.

Kedua, pada awalnya Pemerintah Desa Sendangharjo memaknai sinergi tersebut, sebagai bentuk pelayanan Pemerintah Desa Sendangharjo kepada masyarakat, termasuk kepada petani di desa ini. Selanjutnya, seiring dengan berlangsungnya interaksi para pihak yang terjadi dalam kegiatan SMS, sinergi tersebut oleh Pemerintah Desa Sendangharjo dimaknai, sebagai bentuk tanggungjawab Pemerintah Desa Sendangharjo dalam membantu masyarakat, terutama petani di desa ini.

Dalam membantu masyarakat, jajaran Pemerintah Desa Sendangharjo diperkuat oleh perangkat desa yang berjumlah 13 orang, mulai dari kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan (sebanyak lima orang), kepala dukuh (sebanyak empat orang), serta modin (kepala urusan agama Islam) dan kebayan (kepala urusan sosial) yang masing-masing berjumlah satu orang. Sementara itu, Kepala Desa Sendangharjo bertugas: (1) menyelenggarakan pemerintahan desa, (2) membina kehidupan masyarakat, (3) membina perekonomian desa, (4) memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, (5) mendamaikan perselisihan masyarakat, (6) mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan, (7) mengajukan rancangan peraturan desa dan bersama dengan BPD (Badan Perwakilan Desa) menetapkan peraturan desa, dan (8) menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan tumbuh berkembang di desa.

Ada beberapa istilah yang biasa digunakan oleh masyarakat Desa Sendangharjo untuk menyebut jabatan tertentu perangkat desa, misal: (1) sekretaris desa biasa disebut “carik”, yang tugasnya menyelenggarakan administrasi desa, dan memberikan pelayanan administrasi desa; (2) kepala dukuh biasa disebut

“kamituwo”, yang tugasnya membantu kepala desa di wilayah dukuhnya; (3) kebayan yang bertugas melaksanakan kegiatan sosial di wilayah dukuh yang menjadi tanggung-jawabnya. Selain itu juga ada kepala urusan yang bertugas menyelenggarakan administrasi desa sesuai dengan bidang tugasnya.

Sebagai penghargaan atas kinerjanya, perangkat desa memperoleh tanah bengkok yang luasnya bervariasi, dari yang paling rendah yaitu yang dikelola oleh Sutrisno (Kebayan) seluas 0,5 Ha, sampai yang paling tinggi yaitu yang dikelola oleh Sri Suharyanto (Kepala Desa Sendangharjo) seluas 8,81 Ha. Khusus bagi Sekretaris Desa Sendangharjo, karena sudah pegawai negeri tidak dapat bengkok. Sementara itu para kepala urusan bengkoknya bervariasi antara 1,07 ha – 1,92 Ha. Sedangkan kepala dukuh bengkoknya bervariasi antara 2,36 Ha – 2,82 Ha.

Ketiga, pada awalnya Panitia Desa untuk pelaksanaan SMS di Desa Sendangharjo memaknai sinergi tersebut, sebagai bentuk pelayanan Panitia Desa untuk pelaksanaan SMS di Desa Sendangharjo kepada masyarakat, termasuk kepada petani di desa ini. Selanjutnya, seiring dengan berlangsungnya interaksi para pihak yang terjadi dalam kegiatan SMS, sinergi tersebut oleh Panitia Desa untuk pelaksanaan SMS di Desa Sendangharjo dimaknai, sebagai bentuk ikhtiar Panitia Desa untuk pelaksanaan SMS di Desa Sendangharjo dalam membantu masyarakat, terutama petani di desa ini.

Sriyono (Kasubsi Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Blora) menjelaskan arti penting Panitia Desa dengan menyatakan, bahwa Panitia Desa sangat efektif dalam menangani konflik di desa, selain itu Panitia Desa yang amanah juga menjadi faktor kunci keberhasilan kegiatan SMS. Sebagai contoh, di beberapa

desa di Kabupaten Blora kegiatan SMS seringkali macet, karena biaya SMS yang resmi (yang ditetapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blora) yang telah diserahkan oleh peserta SMS kepada Panitia Desa, ternyata oleh Panitia Desa tidak disampaikan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Blora. Sementara itu, konflik yang terjadi di desa biasanya berupa konflik waris, antar anggota keluarga atau ahli waris, yang biasanya karena tidak ada pembagian waris yang dianggap adil oleh seluruh ahli waris. Sebagaimana diketahui, di Kabupaten Blora ada pembagian waris secara tradisional, di mana rumah atau pekarangan diserahkan kepada ahli waris wanita (perempuan), sedangkan sawah diserahkan pada pria (laki-laki), karena dianggap pria lebih kuat bekerja daripada wanita.

Keempat, pada awalnya kelompok tani memaknai sinergi tersebut, sebagai bentuk dukungan kelompok tani atas perjuangan petani Desa Sendangharjo. Selanjutnya, seiring dengan berlangsungnya interaksi para pihak yang terjadi dalam kegiatan SMS, sinergi tersebut oleh kelompok tani dimaknai, sebagai bentuk ikhtiar kelompok tani bagi tercapainya kepentingan kelompok tani, yaitu meningkatnya kesejahteraan petani yang menjadi anggotanya.

Ketika pelaksanaan kegiatan SMS di Desa Sendangharjo melibatkan kelompok tani, sehingga kelompok tani dapat berkontribusi bagi ikhtiar memberi jaminan kepastian hukum bagi hak atas tanah yang dimiliki petani, maka hal berbeda terjadi di Desa Mojorembun. Djauhari (Sekretaris Desa Mojorembun, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora) menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan SMS di Desa Mojorembun didanai dan dikelola oleh PT. Multi Artha dengan biaya per bidang bervariasi antara Rp. 1 – 2 juta. Setelah sertipikat hak atas tanah terbit warga

membayar biaya sertifikasi ke PT. Multi Artha dengan cara mengangsur sebanyak 12 kali dengan bunga flat. Peserta SMS sebanyak 117 bidang tanah, yang pada awalnya dilakukan sosialisasi kepada warga oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, Pemerintah Desa Mojorembun, dan PT. Multi Artha.

Selanjutnya, Pemerintah Desa Mojorembun membentuk Panitia Desa yang terdiri dari: (1) Ketua: Kepala Desa Mojorembun; (2) Sekretaris: Sekretaris Desa Mojorembun; dan (3) Anggota: empat orang kepala dukuh. Sementara itu, peserta kegiatan SMS adalah warga Desa Mojorembun, dengan tidak memperdulikan anggota kelompok tani atau bukan anggota kelompok tani. Pada Juni 2011, warga desa yang tertarik untuk ikut-serta dalam kegiatan SMS mendaftarkan diri. Seluruh peserta SMS ini kemudian disortir oleh Panitia Desa, hingga lolos 117 bidang tanah. Pembuatan akta dilakukan oleh PT. Multi Artha dengan berkoordinasi dengan Camat Kradenan, tetapi aktanya dibuat PPAT (Notaris) yang ditunjuk oleh PT. Multi Artha.

Pada Nopember 2011, berkas diserahkan ke Kantor Pertanahan oleh PT. Multi Artha. Kemudian, pada Desember 2011 dilakukan pengukuran oleh petugas ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Blora. Saat pengukuran petugas ukur didampingi oleh kepala dukuh setempat sebagai anggota Panitia Desa, sedangkan penunjukan batas dilakukan oleh pemilik tanah dengan disaksikan tetangga yang bersebelahan. Tetapi, karena ada perbedaan luas hasil ukur dengan luas yang tercantum di akta, maka dilakukan renvoi oleh PPAT (Notaris) yang bersangkutan.

Sertipikat hak atas tanah telah terbit dan telah diserahkan pada warga peserta SMS pada Juni 2012. Pendanaan dan pengelolaan pelaksanaan kegiatan SMS oleh PT. Multi Artha dianggap berhasil oleh masyarakat, bila dibandingkan dengan

beberapa tahun sebelumnya, di mana sertipikasi tanah didanai oleh BKK (Badan Kredit Kecamatan) Blora, tetapi setiap empat bulan ada pembaruan administrasi, sehingga merepotkan warga. Sebagaimana diketahui, usaha tani yang dominan di Desa Mojorembun adalah padi dan palawija (jagung). Meskipun begitu, di desa ini juga ada tembakau, semangka, melon, lombok (cabai). Segenap komoditi pertanian ini dikelola oleh para petani yang diorganisir oleh 7 kelompok tani yang ada di Desa Mojorembun. Sementara itu, berkaitan dengan bidang tanah, diketahui bahwa di Desa Mojorembun terdapat 2.322 bidang tanah.

Kelima, pada awalnya Pemerintah Kabupaten Blora memaknai sinergi tersebut, sebagai bentuk pelayanan yang penting dari Kantor Pertanahan, yang perlu didukung oleh Pemerintah Kabupaten Blora. Selanjutnya, seiring dengan berlangsungnya interaksi para pihak yang terjadi dalam kegiatan SMS, sinergi tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Blora dimaknai, sebagai bentuk ikhtiar Kantor Pertanahan dalam meningkatkan kesejahteraan petani, yang sesungguhnya juga masuk dalam program kerja Pemerintah Kabupaten Blora.

Moch. Agus Salam (Kasubsi Penetapan Hak Tanah Kantor Pertanahan Kab. Blora) menjelaskan, bahwa sebetulnya kegiatan yang punya kemampuan untuk memberdayakan masyarakat, bukan cuma SMS, tetapi ada juga PRONA. Kegiatan ini (PRONA) bahkan biayanya lebih murah kalau dibandingkan dengan SMS, tetapi di beberapa desa, perangkat desanya sering tidak berminat untuk melaksanakan PRONA, karena aturannya terlalu ketat. Perangkat desa lebih senang melaksanakan SMS, karena aturannya agak longgar, yang menurut para perangkat desa yang penting adalah transparan dengan warga. Tetapi ada juga perangkat desa yang lebih

senang menyerahkan urusan SMS di desanya kepada pihak ketiga, seperti di Desa Mojorembun, Kecamatan Kradenan. Di Desa Mojorembun, Kecamatan Kradenan SMS didanai dan dikelola oleh PT. Multi Artha, yang meliputi 117 bidang tanah. Setelah sertipikat hak atas tanah terbit warga membayar biaya sertifikasi ke PT. Multi Artha dengan cara mengangsur sebanyak 12 kali dengan bunga flat. Oleh karena itu, dukungan Pemerintah Kabupaten Blora bagi terselenggaranya kegiatan SMS di Desa Sendangharjo merupakan sesuatu yang berarti bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dan bagi kelompok tani di Desa Sendangharjo yang terus menerus memperjuangkan kesejahteraan anggotanya.

Keenam, pada awalnya petani Desa Sendangharjo memaknai sinergi tersebut, sebagai bentuk pelayanan dari Kantor Pertanahan yang bermanfaat buat petani Desa Sendangharjo. Selanjutnya, seiring dengan berlangsungnya interaksi para pihak yang terjadi dalam kegiatan SMS, sinergi tersebut oleh petani Desa Sendangharjo dimaknai, sebagai bentuk ikhtiar petani Desa Sendangharjo dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu kesejahteraan.

Sriyono (Kasubsi Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Blora) menjelaskan, bahwa kegiatan Kantor Pertanahan Kabupaten Blora yang dapat memberdayakan petani Desa Sendangharjo bukan hanya SMS, melainkan ada pula kegiatan yang disebut PRONA. Kegiatan ini (PRONA), diawali dengan usulan desa, yang kemudian para kepala desa pengusul diundang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, untuk bermusyawarah tentang kuota jumlah bidang di masing-masing desa pengusul. Tetapi PRONA kurang diminati oleh perangkat desa, karena dianggap merepotkan, walaupun sebenarnya PRONA diminati oleh warga desa.

Pemerintah desa kurang berminat melaksanakan PRONA, karena bila pemerintah desa menarik pungutan (misal: pologoro), sering mendapat protes dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).

Dengan demikian, yang perlu dibangun adalah adanya sinergi atau kerjasama antara kantor pertanahan dengan semua pihak, termasuk kelompok tani, untuk memberi pelayanan pada masyarakat. Sinergi ini difasilitasi oleh kepala desa, agar bila ada PRONA atau SMS di desa tersebut dapat berjalan lancar. Caranya kepala desa melibatkan ketua atau pengurus kelompok tani dalam kepanitiaan desa untuk membantu pelaksanaan PRONA dan SMS, yang pesertanya juga adalah anggota kelompok tani.

B A B IV P E N U T U P

G. KESIMPULAN

Sinergi Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dengan kelompok tani dalam memberdayakan petani, nampak dalam pelaksanaan kegiatan SMS di Desa Sendangharjo Kecamatan Blora Kabupaten Blora. Kegiatan ini terselenggara atas peran yang dijalankan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dan kelompok tani yang ada di Desa Sendangharjo. Namun demikian tidak dapat dikesampingkan adanya peran pendukung yang dijalankan oleh pihak-pihak lain yang terkait, seperti Pemerintah Desa Sendangharjo, Panitia Desa Untuk Pelaksanaan SMS di Desa Sendangharjo, Pemerintah Kabupaten Blora, dan petani Desa Sendangharjo. Pada awalnya pihak-pihak ini memiliki makna tertentu atas terjadinya sinergi tersebut, tetapi seiring dengan berlangsungnya interaksi para pihak, maka pihak-pihak ini melakukan penyempurnaan terhadap makna sinergi tersebut.

H. REKOMENDASI

Sesungguhnya pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, terutama yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, membutuhkan sinergi dengan banyak pihak. Keberhasilan melakukan sinergi dengan kelompok tani dalam memberdayakan petani melalui pelaksanaan kegiatan SMS di Desa Sendangharjo Kecamatan Blora Kabupaten Blora hendaknya dikembangkan untuk kegiatan-kegiatan lainnya, serta perlu terus menerus diupayakan untuk membangun sinergi dengan banyak pihak.

D A F T A R P U S T A K A

- Arifin. 2012. "Ketika Masyarakat Desa Berubah: Perspektif Teoritis Dan Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Untuk Perumahan." Yogyakarta, STPN Press.
- Ashley,C. and Carney, D. 1999. "*Sustainable Livelihood: Lesson From Corley Experience.*" London, DFID.
- Azwar, Saifuddin. 1998. "Metode Penelitian." Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 2012. "Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah: Kabupaten Blora Tahun 2012." Blora, Pemerintah Kabupaten Blora.
- Berdeque, J.A., and Escobar . 2002 . "*Rural Deversity, Agricultural, Innovation Policies And Poverty Reduction.*" Agricultural Research And Extention Network.
- BP DAS Jeneberang Walane. 2008. "Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan."
- Budianto, J. 2002. "Tantangan Dan Peluang Penelitian Dan Pengembangan Padi Dalam Perspektif Agribisnis." Bogor, Pusat Penelitian Dan pengembangan Tanaman Pangan.
- Jary, David and Julia Jary. 1991. "*Collins: Dictionary of Sociology.*" Glasgow, Harper Collins Publishers.
- Kartasmita, G. 1996. "Power dan Empowerment: Sebuah Telaah Mengenai Konsep Pemberdayaan Masyarakat." Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2007. "Metodologi Penelitian Kualitatif." Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Muhajir, Noeng. 1998. "Metodologi Penelitian Kualitatif." Yogyakarta, Rake Sarasin.
- Orgendo, O. 1998. "*Tenure Regime And Land Use System In Africa: The Challengers At Sustainability.*" Nairobi, Departemen Of Law, University Of Nairobi, Kenya.
- Padmo, Soegijanto. 2000. "Landreform Dan Gerakan Protes Petani Klaten 1959 – 1965." Yogyakarta, Media Pressindo.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2005. "Teori Sosiologi Modern." Jakarta, Prenada Media.
- Rusdi. 2012. "Konflik Sosial Dalam Proses Ganti Rugi Lahan Dan Bangunan Korban Lumpur Lapindo." Yogyakarta, STPN Press.
- Sarjana, Joko P., E. Iriani, M.Norma, dan A. Sutanto. 2001. "KSP Rawa Pening." Semarang, BPTP Jawa Tengah.
- Sembiring, Julius. 2012. "Tanah Negara," Yogyakarta, STPN Press.
- Soekanto, Soerjono. 1998. "Sosiologi: Suatu Pengantar". Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Suprpto, Prasetyo, T. dan Setyani, C. 2006. "Embung Sebagai Alternatif Mencukupi Kebutuhan Air Untuk Usahatani di Kabupaten Blora." Jakarta, Badan Litbang Pertanian.
- Veeger, K.J. 1990. "Realitas Sosial." Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Walter, Elizabeth (editor). 2004. "*Cambridge Learner's Dictionary (2nd Edition).*" Cambridge, Cambridge University Press.